

BAB III

ANALISIS PEMBERITAAN PADA KORAN DIGITAL TEMPO DAN REPUBLIKA MENGENAI BASUKI TJAHAJA PURNAMA PASCA PILKADA PUTARAN PERTAMA DKI JAKARTA

Pada bab ini peneliti akan memaparkan temuan-temuan penelitian mengenai pembingkai berita yang dilakukan oleh Tempo dan Republika terkait pemberitaan mengenai Basuki Tjahaja Purnama pasca pilkada putaran pertama DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan pada periode pemberitaan 18 Februari sampai dengan 18 April 2017, dengan hasil 20 berita dari Tempo dan 20 berita dari Republika dengan topik pemberitaan yang sama. Analisis pemberitaan menggunakan perangkat *framing* dari Robert N. Entman, dengan cara mengupas suatu pemberitaan dari sisi *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgement* dan *treatment recommendation*. Untuk lebih jelasnya berikut pemaparan tiap berita yang dianalisis dengan tiap perangkat framing dari Robert N. Entman.

3.1. Analisis *Define Problems*

Tabel 3.1.1. Analisis *Define Problems* Pemberitaan 1

Media Massa	Define Problems
Tempo	Normalisasi sungai Ciliwung tetap harus dilakukan untuk mengurangi banjir
Republika	Memaksimalkan normalisasi dengan membongkar rumah-rumah yang berada di sekitar Sungai Ciliwung

Berita yang dimuat Tempo berjudul “Banjir Bukit Duri, Ahok: Saya Lagi Cari Jalan Tengah”, dan berita dari Republika berjudul “Ahok Kunjungi Daerah Banjir, Ini yang Dikatakannya”. Dari hasil diatas *define problems* versi Tempo ialah, untuk mengurangi banjir yang melanda ibu kota setiap tahun, normalisasi daerah pinggiran sungai perlu dilakukan. Namun dengan adanya kondisi normalisasi daerah pinggiran sungai baru dapat dilakukan, bila rumah susun

sudah dibangun bagi penduduk yang menjalani relokasi dari lokasi banjir. Pemerintah provinsi DKI Jakarta diharapkan mampu memberikan solusi yang terbaik. Meskipun pemerintah provinsi DKI Jakarta masih dihadapkan pada masalah pembebasan lahan sekitar sungai Ciliwung.

Sedangkan versi Republika ialah, bahwa untuk melakukan normalisasi sungai pemerintah provinsi DKI Jakarta, melalui Ahok memastikan akan membongkar rumah-rumah yang berada di sekitar Sungai Ciliwung. Untuk itu warga yang tinggal di daerah sekitar sungai harus dipindahkan.

Tabel 3.1.2. Analisis *Define Problems* Pemberitaan 2

Media Massa	Define Problems
Tempo	Diminta untuk menonaktifkan Ahok, Presiden Joko Widodo menunggu fatwa MA atau keputusan PTUN atas kasus Ahok
Republika	Meminta Jokowi menonaktifkan Ahok karena menyebabkan kebisingan politik dalam negeri

Pada pemberitaan kedua, Tempo memuat berita berjudul “Banjir Pemuda Muhammadiyah Minta Ahok Dicotot, Jokowi: Tunggu Sidang”, dan berita dari Republika berjudul “PP Muhammadiyah Bilang ke Jokowi: Penting Ahok Dinonaktifkan”. Dari hasil diatas *define problems* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, untuk bisa menonaktifkan Ahok dari jabatannya, Jokowi menunggu fatwa MA atau keputusan PTUN. Presiden meminta untuk tetap bersabar, dan menunggu ada argumentasi atau keputusan hukum formal, yang memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk menonaktifkan Ahok.

Selanjutnya menurut Republika menilai produktivitas masyarakat menurun karena adanya kebisingan politik dalam negeri. Yang menyebabkan kebisingan politik itu, adalah banyaknya desakan untuk menonaktifkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang menjadi terdakwa dalam kasus penodaan agama. Sehingga banyak kalangan yang turut ikut memberikan argumentasi serta pendapatnya masing-masing yang membuat keadaan politik dalam negeri menjadi

semrawut. Dan dengan menonaktifkan Ahok akan menjadi solusi untuk permasalahan tersebut.

Tabel 3.1.3. Analisis *Define Problems* Pemberitaan 3

Media Massa	Define Problems
Tempo	Meminta saksi membandingkan kasus Ahok yang mengutip Surat Al-Maidah ayat 51 dengan sebuah perumpamaan seorang teroris yang mengutip Surat Al-Baqarah ayat 191
Republika	Kuasa hukum Ahok tidak bertanya kepada saksi ahli dari MUI, lantaran pendapat yang disampaikan ahli MUI dinilai tidak objektif

Pada analisis pemberitaan yang ketiga, Tempo memuat berita berjudul “Pengacara Ahok Ajukan Pertanyaan Soal Teroris Kutip Al-Quran”, sedangkan berita dari Republika berjudul “Pengacara Ahok Kembali tidak akan Bertanya Pada Saksi MUI”. Dari hasil diatas *define problems* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, kuasa hukum Ahok memberikan sebuah perumpamaan dalam persidangan “Jangan percaya sama teroris tersebut dan jangan mau dibohongi Surat Al-Baqarah ayat 191, apakah orang yang mengatakan itu salah?”. Dan membandingkan pada kasus Ahok yang mengutip Surat Al-Maidah ayat 51 dengan sebuah perumpamaan seorang teroris yang mengutip Surat Al-Baqarah ayat 191 tersebut.

Sedangkan versi Republika adalah, tim penasihat hukum Ahok menegaskan tidak akan bertanya kepada saksi ahli dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lantaran pendapat yang disampaikan ahli MUI dinilai tidak objektif, dengan menilai sikap dan keputusan agama terhadap Ahok merupakan produk MUI.

Tabel 3.1.4. Analisis *Define Problems* Pemberitaan 4

Media Massa	Define Problems
Tempo	Ahok meminta permohonan maaf lantaran merasa kurang maksimal bekerja setelah aktif sebagai Gubernur
Republika	Ahok meminta maaf kepada seluruh warga Jakarta tentang persoalan banjir, usai menjalani persidangan

Pada analisis pemberitaan yang keempat, Tempo memuat berita berjudul “Ahok Minta Maaf Seusai Jalani Sidang Lanjutan, Ini Sebabnya”, sedangkan berita dari Republika berjudul “Ahok Minta Maaf ke Warga Jakarta Soal Banjir, Ini Alasannya”. Dari hasil diatas *define problems* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, Ahok meminta maaf kepada warga DKI setelah mengikuti sidang lanjutan. Pemohonan maaf itu disampaikan lantaran merasa kurang maksimal bekerja setelah aktif kembali menjadi Gubernur.

Sedangkan versi Republika adalah, Ahok meminta maaf kepada seluruh warga Jakarta sesudah persidangan. Seharusnya waktu yang digunakan untuk persidangan yang dijalani bisa dipakai untuk bekerja mengatasi banjir di Jakarta. Karena saat itu di beberapa wilayah DKI Jakarta sedang mengalami banjir.

Tabel 3.1.5. Analisis *Define Problems* Pemberitaan 5

Media Massa	Define Problems
Tempo	Kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok bukan termasuk delik aduan
Republika	Kasus penodaan agama yang dilakukan Ahok bukan termasuk delik aduan

Pada analisis pemberitaan yang kelima, Tempo memuat berita berjudul “Kasus Ahok, Ahli Pidana: Bukan Delik Aduan”, sedangkan berita dari Republika berjudul “Ahli: Kasus Ahok Bukan Termasuk Delik Aduan”. Dari hasil diatas *define problems* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama bukan merupakan

delik aduan. Sehingga pihak kepolisian seharusnya bisa berinisiatif mengusut kasus dugaan penistaan tersebut tanpa menunggu adanya laporan dari masyarakat.

Hampir serupa dengan Tempo, dari pemberitaan Republika memiliki hasil yang mirip yaitu kasus penodaan agama yang dilakukan Ahok bukan termasuk delik aduan. Sehingga warga di luar Kepulauan Seribu bisa saja melaporkan Ahok kepada aparat kepolisian dengan adanya kasus penodaan agama tersebut.

Tabel 3.1.6. Analisis *Define Problems* Pemberitaan 6

Media Massa	Define Problems
Tempo	Basuki Tjahaja Purnama, menyatakan lebih memilih kerja ketimbang cuti untuk melakukan kampanye
Republika	Ahok mengatakan tak memikirkan waktu cuti selama kampanye

Pada analisis pemberitaan yang keenam, Tempo memuat berita berjudul “Ahok Lebih Pilih Kerja ketimbang Cuti Kampanye, Ini Sebabnya”, sedangkan berita dari Republika berjudul “Ditanya Kapan Cuti Kampanye, Ini Kata Ahok”. Dari hasil diatas *define problems* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, Basuki Tjahaja Purnama menyatakan lebih memilih kerja ketimbang cuti untuk melakukan kampanye. Ahok memilih memaksimalkan waktu untuk menunjukkan hasil kinerja sebagai Gubernur.

Sedangkan analisis pada berita Republika ialah, Ahok tak tahu kapan tepatnya waktu cuti untuk menghadapi Pilgub DKI Jakarta putaran kedua. Ahok memilih untuk tidak memikirkan waktu cuti untuk kampanye Pilgub tersebut.

Tabel 3.1.7. Analisis *Define Problems* Pemberitaan 7

Media Massa	Define Problems
Tempo	Harapan terkait dengan kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud ke Indonesia
Republika	Harapan bahwa kuota haji untuk jamaah haji Indonesia ditambah

Pada analisis pemberitaan yang ketujuh, Tempo memuat berita berjudul “Raja Arab Berkunjung ke Indonesia, Ini Harapan Ahok”, sedangkan berita dari Republika berjudul “Ini Harapan Ahok Atas Kunjungan Raja Salman”. Dari hasil diatas *define problems* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, dengan kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud ke Indonesia pada awal Maret 2017. Minimal kuota haji asal Indonesia bisa diberi penambahan.

Sedangkan analisis pada berita Republika yang hampir serupa ialah, dengan harapan dapat meningkatkan kerja sama Indonesia dengan Arab Saudi. Lalu, penanaman investasi yang menguntungkan kedua pihak, serta penambahan kuota haji yang lebih banyak.

Tabel 3.1.8. Analisis *Define Problems* Pemberitaan 8

Media Massa	Define Problems
Tempo	Menghentikan pemasangan papan reklame atau baliho di area sarana dan prasarana milik pemerintah DKI Jakarta
Republika	Menebang papan reklame yang kerap membahayakan para pengguna jalan

Pada analisis pemberitaan yang kedelapan, Tempo memuat berita berjudul “Pemasangan Reklame Masih Ada, Ini Penjelasan Ahok”, sedangkan berita dari Republika berjudul “Ahok Ingin Tebang Papan Reklame”. Dari hasil diatas *define problems* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, membenarkan untuk menghentikan pemasangan papan reklame atau baliho yang

sering roboh dan membahayakan masyarakat. Namun masih terkendala dengan tidak adanya peraturan yang kuat mengatur pemasangan reklame di area publik.

Selanjutnya versi Republika adalah, untuk pemerintah lebih tegas dengan menebang papan reklame yang kerap membahayakan para pengguna jalan. Serta membuat peraturan yang dapat memberikan sanksi tegas kepada pemilik reklame yang roboh hanya karena angin dan hujan.

Tabel 3.1.9. Analisis *Define Problems* Pemberitaan 9

Media Massa	Define Problems
Tempo	Rizieq Shihab tidak menyalami Basuki Tjahaja Purnama, dalam sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama
Republika	Rizieq Shihab yang dihadirkan sebagai ahli Agama Islam dalam lanjutan sidang kasus penodaan agama tak mempunyai masalah pribadi dengan Ahok

Pada analisis pemberitaan yang kesembilan, Tempo memuat berita berjudul “Rizieq Tak Salami Ahok, Pengacara: Ada Masalah Pribadi”, sedangkan berita dari Republika berjudul “Habib Rizieq: Saya tak Punya Masalah Pribadi dengan Ahok”. Dari hasil diatas *define problems* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, mengangkat dari sisi kuasa hukum Ahok dengan menilai adanya motif personal yang mempengaruhi Rizieq Shihab dalam memberikan keterangan. Sehingga keterangannya sebagai saksi ahli dalam kasus dugaan penistaan agama dinilai tidak objektif.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, mengangkat dari sisi Rizieq Shihab dengan menilai tidak ada masalah pribadi antara Rizieq dengan Ahok. Sehingga kesaksian yang diberikan ialah netral dan diberikan dalam kapasitasnya sebagai saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tabel 3.1.10. Analisis *Define Problems* Pemberitaan 10

Media Massa	Define Problems
Tempo	Ahok akan menghadirkan dua hingga tiga orang saksi fakta pada sidang lanjutan kasus penistaan agama
Republika	Ahok akan menghadirkan saksi yang meringankannya pada sidang lanjutan kasus penistaan terhadap agama

Pada analisis pemberitaan yang kesepuluh, Tempo memuat berita berjudul “Kubu Ahok Akan Hadirkan Saksi Fakta pada Sidang Pekan Depan”, sedangkan berita dari Republika berjudul “Ahok akan Hadirkan Saksi yang Meringankannya”. Dari hasil diatas *define problems* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, Basuki Tjahaja Purnama akan menghadirkan dua hingga tiga orang saksi fakta pada sidang lanjutan kasus penistaan agama. Saksi dihadirkan oleh pihak kuasa hukum Ahok karena saksi yang dihadirkan Jaksa sudah dianggap cukup.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, Ahok akan menghadirkan saksi yang meringankannya pada sidang lanjutan kasus penistaan terhadap agama. Saksi-saksi yang meringankan Ahok ini dihadirkan untuk memberi pembelaan terhadap Ahok yang mampu melawan pernyataan saksi yang telah dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama.

Tabel 3.1.11. Analisis *Define Problems* Pemberitaan 11

Media Massa	Define Problems
Tempo	Basuki Tjahaja Purnama mendatangi makam Mbah Priok yang berada di Koja, Jakarta Utara
Republika	Basuki Tjahaja Purnama mengunjungi makam Habib Hasan Bin Muhammad Al Hadad (Mbah Priok) pada sabtu pagi

Pada analisis pemberitaan ini, Tempo memuat berita berjudul “Ahok Resmikan Makam Mbah Priok sebagai Cagar Budaya”, sedangkan berita dari Republika berjudul “Ahok Kunjungi Makam Mbah Priok, Ini yang Dilakukannya”. Dari hasil diatas *define problems* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, Basuki Tjahaja Purnama mendatangi makam Mbah Priok yang berada di Koja, Jakarta Utara dan menetapkan makam Mbah Priok sebagai salah satu cagar budaya.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, Basuki Tjahaja Purnama mengunjungi makam Habib Hasan Bin Muhammad Al Hadad (Mbah Priok) pada sabtu pagi. Pada kesempatan itu Ahok meninjau lahan yang akan dibangun masjid dan juga sempat masuk ke dalam pengobatan klinik pengobatan Syech Sayyid Mbah Priok.

Tabel 3.1.12. Analisis *Define Problems* Pemberitaan 12

Media Massa	Define Problems
Tempo	Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat meninggalkan acara penetapan pasangan calon gubernur DKI yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta
Republika	Perginya Calon Gubernur pejawat DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama dari acara Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta

Pada analisis pemberitaan ini, Tempo memuat berita berjudul “Pleno KPU DKI Molor, Ahok-Djarot Keluar Sebelum Rapat”, sedangkan berita dari Republika berjudul “Ini Alasan Ahok Pergi dari Acara KPU Jakarta”. Dari hasil diatas *define problems* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, molornya acara yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta ini membuat wajar jika Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat meninggalkan acara penetapan pasangan calon gubernur DKI.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, perginya Calon Gubernur pejawat DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama dari acara Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta disebabkan Ahok keberatan karena acara yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta ini terlambat satu jam.

Tabel 3.1.13. Analisis *Define Problems* Pemberitaan 13

Media Massa	Define Problems
Tempo	JPU keberatan atas kehadiran saksi fakta, yang merupakan kakak angkat Basuki Tjahaja Purnama, Analta Amir
Republika	Majelis hakim menolak salah satu saksi yang dihadirkan pengacara Ahok, yakni Andi Analta Amir

Pada analisis pemberitaan ini, Tempo memuat berita berjudul “Hakim Tolak Kesaksian Kakak Angkat Ahok”, sedangkan berita dari Republika berjudul “Hakim Tolak Kakak Angkat Ahok Menjadi Saksi”. Dari hasil diatas *define problems* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, menilai dengan jaksa penuntut umum menyampaikan keberatan atas kehadiran saksi fakta, yang merupakan kakak angkat Basuki Tjahaja Purnama, Analta Amir. Majelis hakim menolak Analta sebagai salah satu saksi fakta karena dianggap melakukan pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, mendukung keputusan majelis hakim yang menolak salah satu saksi yang dihadirkan pengacara Ahok, yakni Andi Analta Amir karena pernah datang ke persidangan sebelumnya.

Tabel 3.1.14. Analisis *Define Problems* Pemberitaan 14

Media Massa	Define Problems
Tempo	Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma datang ke Indonesia bersama rombongan delegasi kenegaraannya
Republika	Megawati menyambut kunjungan Presiden Afrika Selatan, Jacob Zuma

Pada analisis pemberitaan ini, Tempo memuat berita berjudul “Presiden Afrika Selatan Sambangi Megawati, Ahok dan Djarot Hadir”, sedangkan berita dari Republika berjudul “Dampingi Megawati, Ahok Terima Kunjungan Presiden Afrika Selatan”. Dari hasil diatas *define problems* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, presiden Afrika Selatan Jacob Zuma datang untuk mengunjungi mantan presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri dikediamannya. Zuma datang bersama rombongan delegasi kenegaraannya.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, Megawati Soekarnoputri dalam rangka menyambut presiden Afrika Selatan Jacob Zuma, didampingi Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, serta pasangan, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

Tabel 3.1.15. Analisis *Define Problems* Pemberitaan 15

Media Massa	Define Problems
Tempo	Jaksa Penuntut Umum mempersoalkan saksi ahli hukum pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Edward Omar Sharif Hiariej
Republika	Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak menghadirkan saksi ahli, Edward Omar Haritjh di sidang Basuki Tjahaja Purnama atas kasus dugaan penistaan agama

Pada analisis pemberitaan ini, Tempo memuat berita berjudul “Sidang Ahok, Jaksa Persoalkan Saksi Ahli Pidana UGM”, sedangkan berita dari Republika berjudul “Ini Alasan Jaksa Batal Hadirkan Edward dalam Sidang Ahok”. Dari hasil diatas *define problems* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, Edward dihadirkan oleh tim kuasa hukum Ahok sebagai saksi ahli yang meringankan Ahok, karena Edward tidak dihadirkan dalam persidangan oleh JPU. JPU menolak hal tersebut karena Edward dianggap menjadi saksi ahli yang pernah diperiksa oleh jaksa penuntut umum dalam penyidikan.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak menghadirkan saksi ahli, Edward Omar Haritjh di sidang Basuki Tjahaja Purnama

karena keterangannya yang berbeda-beda. Namun justru dihadirkan kuasa hukum Ahok dan memberikan pembelaan yang meringankan Ahok.

Tabel 3.1.16. Analisis *Define Problems* Pemberitaan 16

Media Massa	Define Problems
Tempo	Basuki Tjahaja Purnama mendapat oleh-oleh buku saat berkunjung ke kediaman mendiang cendekiawan muslim Nurcholis Madjid. Buku tersebut berisi tentang pemikiran-pemikiran Cak Nur, terutama tentang kehidupan bertoleransi
Republika	Basuki Tjahaja Purnama menyambangi kediaman keluarga mendiang Nurcholis Madjid, kedatangannya untuk bersilaturahmi serta menjenguk istri dari mendiang Nurcholis Madjid

Pada analisis pemberitaan ini, Tempo memuat berita berjudul “Bertandang ke Kediaman Nurcholis Madjid, Ahok Diberi 4 Buku”, sedangkan berita dari Republika berjudul “Ahok Sambangi Rumah Cak Nur”. Dari hasil diatas *define problems* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, Basuki Tjahaja Purnama berkunjung ke kediaman mendiang cendekiawan muslim Nurcholis Madjid, dan mendapat oleh-oleh buku yang berisi tentang pemikiran-pemikiran Cak Nur, terutama tentang kehidupan bertoleransi.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, Basuki Tjahaja Purnama menyambangi kediaman keluarga mendiang Nurcholis Madjid, tujuan dari kedatangannya ialah untuk bersilaturahmi serta menjenguk istri dari mendiang Nurcholis Madjid yang dikabarkan sakit.

Tabel 3.1.17. Analisis *Define Problems* Pemberitaan 17

Media Massa	Define Problems
Tempo	Basuki Tjahaja Purnama menanggapi pernyataan lawan politiknya, Anies Baswedan, yang menganggap kerjasama PT Transjakarta dan angkutan Koperasi Wahana Kalpika, meniru program Ok Otrip sebagai fitnah
Republika	Basuki Tjahaja Purnama geram disebut meniru program yang dicetuskan pasangan calon nomor urut tiga, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno

Pada analisis pemberitaan ini, Tempo memuat berita berjudul “Integrasi Transjakarta dan KWK Mirip Program Anies, Ahok: Fitnah”, sedangkan berita dari Republika berjudul “Ahok Geram Disebut Menyontek Program Anies”. Dari hasil diatas *define problems* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, Basuki Tjahaja Purnama menyebut pernyataan lawan politiknya, Anies Baswedan sebagai fitnah. Karena integrasi Transjakarta dengan angkutan umum KWK sudah diatur dalam undang-undang lalu lintas yang keluar jauh hari sebelum pilkada DKI 2017. Jadi kerjasama PT Transjakarta dan angkutan Koperasi Wahana Kalpika, meniru program Ok Otrip hanya fitnah dan tidak benar.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, Basuki Tjahaja Purnama geram disebut meniru program yang dicetuskan pasangan calon nomor urut tiga, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Ahok dinilai kepanasan sendiri karena disebut sebagai peniru dari program yang dibawa pasangan lawannya.

Tabel 3.1.18. Analisis *Define Problems* Pemberitaan 18

Perangkat Framing	Define Problems
Tempo	Perempuan berinisial RR, dilarang memasuki ruang sidang kasus penodaan agama
Republika	Wanita beratribut relawan Ahok berinisial RR diamankan petugas keamanan

Pada analisis pemberitaan ini, Tempo memuat berita berjudul “Bawa Sangkur ke Ruang Sidang Ahok, Perempuan Ini Ditangkap”, sedangkan berita dari Republika berjudul “Wanita Beratribut Relawan Ahok Bawa Sangkur ke Persidangan”. Dari hasil diatas *define problems* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, perempuan berinisial RR, dilarang memasuki ruang sidang kasus penodaan agama. Perempuan itu diamankan saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas yang berjaga di luar pintu persidangan, dan perempuan tersebut langsung diamankan oleh petugas.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, Wanita beratribut relawan Ahok berinisial RR, membawa senjata tajam ke persidangan dan diamankan petugas keamanan. Wanita tersebut diamankan ketika hendak memasuki gedung Auditorium Kementerian Pertanian saat persidangan lanjutan kasus dugaan penistaan agama.

Tabel 3.1.19. Analisis *Define Problems* Pemberitaan 19

Media Massa	Define Problems
Tempo	Basuki Tjahaja Purnama melontarkan ucapan tentang Al Maidah 51 saat pidato di Kepulauan Seribu ketika tengah berbicara tentang budidaya perikanan
Republika	Alasan Basuki Tjahaja Purnama teringat dengan surat Al-Maidah ayat 51 ialah setelah melihat tidak antusias para ibu di sosialisasi budidaya ikan kerapu di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu

Pada analisis pemberitaan ini, Tempo memuat berita berjudul “Ahok Ungkap Kenapa Sebut Al Maidah 51 di Pidato Kepulauan Seribu”, sedangkan berita dari Republika berjudul “Ahok Klaim Sebut Al-Maidah karena Ibu-Ibu tak Antusias”. Dari hasil diatas *define problems* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, dengan adanya ibu-ibu yang kurang respon, Basuki Tjahaja Purnama melontarkan ucapan yang menyinggung tentang Al Maidah 51 saat pidato dalam kunjungan kerja di Kepulauan Seribu yang tengah membicarakan tentang budidaya perikanan.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, Basuki Tjahaja Purnama beralasan teringat dengan surat Al-Maidah ayat 51 ialah setelah melihat para ibu tidak antusias di sosialisasi budidaya ikan kerapu di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Dari respon warga Kepulauan Seribu yang tidak antusias, dianggap karena adanya seruan serta selebaran larangan memilih pemimpin non-Muslim yang mengutip surat Al-Maidah.

Tabel 3.1.20. Analisis *Define Problems* Pemberitaan 20

Media Massa	Define Problems
Tempo	Basuki Tjahaja Purnama, memanfaatkan waktu cuti untuk pulang ke kampung halamannya di Manggar, Belitung
Republika	Basuki Tjahaja Purnama pulang ke kampung halamannya di Bangka Belitung

Pada analisis pemberitaan ini, Tempo memuat berita berjudul “Pulang Kampung, Ahok Berziarah ke Makam Bapaknya”, sedangkan berita dari Republika berjudul “Ahok Pulang Kampung ke Belitung”. Dari hasil diatas *define problems* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, memanfaatkan waktu cuti Basuki Tjahaja Purnama menziarahi makam ayahnya, Indra Tjahaja Purnama di kampung halamannya di Manggar, Belitung.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, Basuki Tjahaja Purnama pulang ke kampung halamannya di Bangka Belitung, pejabat itu pulang kampung dalam rangka ziarah ke makam Ayahanda, Indra Tjahaja Purnama.

3.2. Analisis *Diagnose Causes*

Tabel 3.2.1. Analisis *Diagnose Causes* Pemberitaan 1

Media Massa	Diagnose Causes
Tempo	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih dihadapkan pada masalah pembebasan lahan. Hal Ini membuat pemerintah provinsi DKI Jakarta kesulitan merelokasi warga dari lokasi banjir
Republika	Warga sekitar sungai Ciliwung dipindahkan agar rumahnya bisa dibongkar dan proses normalisasi sungai Ciliwung bisa berjalan maksimal

Pada analisis pemberitaan yang pertama, dari hasil diatas *diagnose causes* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, yang menjadi penyebab normalisasi sekitar sungai Ciliwung belum mampu dilakukan secara maksimal dikarenakan belum tersedianya rumah susun bagi warga yang akan direlokasi dari daerah sekitar sungai Ciliwung khususnya warga Bukit Duri. Yang menjadi penyebab utama belum tersedianya rumah susun adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih dihadapkan pada masalah pembebasan lahan yang belum menemui titik temu antara pemerintah dan pemilik lahan. Ini membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terlambat membangun rumah susun untuk merelokasi warga dari daerah banjir, khususnya untuk warga Bukit Duri.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, rumah-rumah warga yang bermukim disekitar sungai Ciliwung harus dibongkar karena rumah-rumah warga berdiri di daerah pinggiran sungai. Warga yang tinggal sekitar sungai Ciliwung dipindahkan agar rumahnya bisa dibongkar dan proses normalisasi sungai Ciliwung bisa berjalan maksimal. Warga bersedia pindah dengan syarat tanah mereka harus dibeli, namun mereka tidak memiliki sertifikat atas tanah yang mereka tempati.

Tabel 3.2.2. Analisis *Diagnose Causes* Pemberitaan 2

Media Massa	Diagnose Causes
Tempo	Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Simanjuntak meminta menonaktifkan Ahok, karena menjadi sumber kebisingan politik di Indonesia saat ini
Republika	Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Simanjuntak menilai produktivitas masyarakat juga menurun karena adanya kebisingan politik dalam negeri

Pada analisis pemberitaan yang kedua, dari hasil diatas *diagnose causes* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, yang menjadi alasan kenapa Presiden Joko Widodo diminta untuk menonaktifkan Ahok adalah adanya desakan dari banyak pihak. Salah satunya ialah Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Simanjuntak yang meminta untuk menonaktifkan Ahok, dengan alasan bahwa Ahok menjadi sumber kebisingan politik di Indonesia saat ini. Namun menanggapi semua itu, Jokowi memutuskan untuk menunggu fatwa MA atau keputusan PTUN atas kasus Ahok.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Simanjuntak menilai produktivitas masyarakat juga menurun karena adanya kebisingan politik dalam negeri. Oleh karena itu maka meminta Jokowi untuk segera menonaktifkan Ahok karena menyebabkan kebisingan politik dalam negeri.

Tabel 3.2.3. Analisis *Diagnose Causes* Pemberitaan 3

Media Massa	Diagnose Causes
Tempo	Kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama menilai ada kesamaan kasus Ahok dengan perumpamaan tentang teroris
Republika	Tim penasihat hukum menilai MUI tidak objektif dalam sikap dan keputusan agama terhadap Ahok

Pada analisis pemberitaan yang ketiga, dari hasil diatas *diagnose causes* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama mengajukan pertanyaan mengenai perumpamaan teroris karena menilai ada kesamaan kasus Ahok dengan perumpamaan tentang teroris tersebut. Tim kuasa hukum melihat bahwa kliennya mengutip ayat tersebut untuk mengingatkan adanya elite politik yang menggunakan Surat Al-Maidah ayat 51 untuk sebuah kepentingan tertentu. Oleh karena itu sikap Ahok dinilai wajar untuk sekedar mengingatkan masyarakat.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, Tim penasihat hukum tidak mengajukan pertanyaan dalam sidang karena menilai MUI tidak objektif dalam sikap dan keputusan agama terhadap Ahok. Karena MUI dianggap yang membuat produk keputusan agama terhadap Ahok yang membuatnya terseret kedalam meja hijau.

Tabel 3.2.4. Analisis *Diagnose Causes* Pemberitaan 4

Media Massa	Diagnose Causes
Tempo	Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan permohonan maaf kepada warga DKI Jakarta, karena tidak bisa kerja penuh waktu saat warga Jakarta sedang mengalami banjir
Republika	Basuki Tjahaja Purnama meminta maaf karena seharusnya waktu persidangan yang dijalani bisa dipakai untuk bekerja mengatasi banjir di Jakarta

Pada analisis pemberitaan yang keempat, dari hasil diatas *diagnose causes* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan permohonan maaf kepada warga DKI Jakarta, karena tidak bisa kerja penuh waktu saat warga Jakarta sedang mengalami banjir. Meskipun telah kembali aktif sebagai Gubernur, Ahok merasa kurang maksimal bekerja karena harus juga membagi waktu untuk mengikuti persidangan atas kasus dugaan penistaan agama. Sebagian waktu kerja yang bisa dimaksimalkan untuk mengurus Jakarta terambil untuk menjalani sidang kasus dugaan penistaan agama.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, Basuki Tjahaja Purnama meminta maaf karena seharusnya waktu persidangan yang dijalani bisa dipakai untuk bekerja mengatasi banjir di Jakarta. Dengan menjalani persidangan yang memakan waktu 14 jam, membuat Ahok tidak bisa kerja penuh waktu. Padahal, sebagian wilayah DKI Jakarta sedang mengalami banjir.

Tabel 3.2.5. Analisis *Diagnose Causes* Pemberitaan 5

Media Massa	Diagnose Causes
Tempo	Ahli pidana dari Universitas Islam Indonesia, Mudzakkir menyatakan kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok bukan termasuk delik aduan. Kepolisian bisa mengusutnya walaupun tidak ada laporan dari masyarakat
Republika	Ahli pidana dari Universitas Islam Indonesia, Mudzakkir menyatakan kasus penodaan agama yang dilakukan Ahok bukan delik aduan. Warga di luar Kepulauan Seribu bisa saja melaporkan Ahok kepada aparat kepolisian

Pada analisis pemberitaan yang kelima, dari hasil diatas *diagnose causes* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok bukan termasuk delik aduan ini sesuai dari pernyataan saksi ahli pidana dari Universitas Islam Indonesia, Mudzakkir. Oleh karena itu maka, pihak kepolisian seharusnya bisa mengusut kasus dugaan penistaan agama tersebut meskipun tidak ada laporan dari masyarakat. Meskipun akhirnya kasus diusut dengan menunggu adanya laporan dari warga yang bukan dari tempat pidato yang diduga menistakan agama, pihak kepolisian seharusnya cukup tanggap dalam mengatasi kasus dugaan penistaan agama tersebut.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, bahwa ahli pidana dari Universitas Islam Indonesia, Mudzakkir menyatakan kasus penodaan agama yang dilakukan Ahok bukan delik aduan. Oleh sebab itu, warga di luar Kepulauan Seribu bisa saja melaporkan Ahok kepada aparat kepolisian dengan adanya dugaan penodaan agama. Masyarakat yang melaporkan Ahok atas kasus penodaan agama sendiri tidak ada satupun dari warga di Kepulauan Seribu. Masyarakat mempunyai hak

untuk melaporkan hal tersebut, karena kepentingan mereka terganggu terkait dengan kitab suci yang mereka imani diduga telah dinodai.

Tabel 3.2.6. Analisis *Diagnose Causes* Pemberitaan 6

Media Massa	Diagnose Causes
Tempo	Basuki Tjahaja Purnama cuti kembali sesuai dengan aturan yang berlaku terkait Pilkada
Republika	Basuki Tjahaja Purnama tidak memikirkan cuti, karena lebih memikirkan kerja yang optimal

Pada analisis pemberitaan yang keenam, dari hasil diatas *diagnose causes* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, sesuai dengan aturan yang berlaku terkait Pilkada, Ahok harus kembali cuti untuk melakukan kampanye pada Pilkada putaran kedua. Meskipun Ahok menyatakan lebih memilih untuk kerja agar mampu menunjukkan bukti kinerja yang nyata, namun sesuai peraturan maka Ahok harus kembali cuti sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, Basuki Tjahaja Purnama tidak memikirkan cuti, karena lebih memikirkan kerja yang optimal. Karena menurut Ahok dengan kerja yang optimal mampu menunjukkan keseriusanya dalam membangun Jakarta yang lebih baik. Hasil dari kerja keras yang dilakukan Ahok mampu menjadi gambaran mengenai apa yang telah dilakukan oleh calon inkumben.

Tabel 3.2.7. Analisis *Diagnose Causes* Pemberitaan 7

Media Massa	Diagnose Causes
Tempo	Basuki Tjahaja Purnama berharap minimal kuota naik haji ditambah
Republika	Basuki Tjahaja Purnama berharap bahwa kuota haji untuk jamaah haji Indonesia ditambah

Pada analisis pemberitaan yang ketujuh, dari hasil diatas *diagnose causes* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, kedatangan Raja Arab Saudi

Salman bin Abdulaziz al-Saud ke Indonesia membuat Basuki Tjahaja Purnama berharap minimal kuota naik haji ditambah. Karena kuota jemaah haji Indonesia dikurangi menjadi 168 ribu jemaah pada tahun 2013. Untuk itu dalam kesempatan kedatangan Raja Salman, kuota haji yang dikurangi dapat ditambahkan kembali pada tahun ini.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, dari kunjungan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud dari Kerajaan Arab Saudi ke Indonesia, Basuki Tjahaja Purnama berharap bahwa kuota haji untuk jemaah haji Indonesia ditambah. Selain itu dari kunjungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kerja sama Indonesia dengan Arab Saudi. Dan mendorong penanaman investasi dari Raja Salman yang mampu mendorong perekonomian Indonesia menjadi lebih baik.

Tabel 3.2.8. Analisis *Diagnose Causes* Pemberitaan 8

Media Massa	Diagnose Causes
Tempo	Pemerintah Provinsi tidak akan memberikan izin pemasangan papan reklame lagi di Ibu Kota karena konstruksi papan reklame yang ada saat ini mudah roboh dan tidak pernah diaudit
Republika	Pemerintah Provinsi akan merapikan reklame yang membahayakan para pengguna jalan karena gampang roboh terkena angin dan hujan

Pada analisis pemberitaan yang kedelapan, dari hasil diatas *diagnose causes* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, untuk menghentikan pemasangan papan reklame atau baliho di area sarana dan prasarana milik pemerintah DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi tidak akan memberikan izin pemasangan papan reklame lagi di Ibu Kota. Ini dilakukan karena konstruksi papan reklame yang ada saat ini mudah roboh dan tidak pernah diaudit. Oleh karena itu, papan reklame tersebut bisa dialihkan dengan *large electronic display*(LED) agar terlihat lebih rapi dan konstuksi yang lebih kokoh dan rapi.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, Pemerintah Provinsi akan merapikan reklame yang membahayakan para pengguna jalan karena gampang

robah terkena angin dan hujan. Namun keputusan untuk menebang reklame masih menunggu habisnya masa izin reklame. Selain itu akan dibuat peraturang terkait pemasangan reklame di area publik. Dan memberikan sanksi yang tegas bila papan reklame dapat roboh karena angin atau hujan yang kecil.

Tabel 3.2.9. Analisis *Diagnose Causes* Pemberitaan 9

Media Massa	Diagnose Causes
Tempo	Rizieq Shihab memiliki motif personal dan sedang dalam status bermasalah karena terjerat beberapa kasus hukum
Republika	Rizieq Shihab tidak kenal dan tak mempunyai hubungan apa pun dengan Ahok

Pada analisis pemberitaan yang kesembilan, dari hasil diatas *diagnose causes* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, Rizieq Shihab yang tidak menyalami Basuki Tjahaja Purnama, dalam sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama dianggap tidak objektif dalam persidangan. Karena Rizieq memiliki motif personal dan sedang dalam status bermasalah karena terjerat beberapa kasus hukum, oleh karena itu membuat keterangan Rizieq di persidangan menjadi subyektif. Meskipun demikian majelis hakim yang dipimpin oleh Dwiarso Budi Setiarto tetap melanjutkan persidangan kasus dugaan penistaan agama.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, Rizieq Shihab yang dihadirkan sebagai ahli Agama Islam dalam lanjutan sidang kasus penodaan agama tak mempunyai masalah pribadi dengan Ahok. Karena Rizieq Shihab sendiri tidak kenal dan tak mempunyai hubungan apa pun dengan Ahok. Dan menjelaskan bahwa siapa saja yang melakukan penodaan agama baik itu masyarakat biasa maupun pejabat pemerintahan harus diproses secara hukum yang adil.

Tabel 3.2.10. Analisis *Diagnose Causes* Pemberitaan 10

Media Massa	Diagnose Causes
Tempo	Jaksa penuntut umum tidak akan mendatangkan saksi lagi pada persidangan kasus dugaan penistaan agama
Republika	JPU tidak keberatan saksi ahli yang belum memberikan keterangan tidak perlu dihadirkan, mengingat pekan depan adalah kesempatan terakhir JPU menghadirkan saksi

Pada analisis pemberitaan yang kesepuluh, dari hasil diatas *diagnose causes* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, Basuki Tjahaja Purnama akan menghadirkan dua hingga tiga orang saksi fakta yang meringankannya karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak akan mendatangkan saksi lagi pada persidangan kasus dugaan penistaan agama. Dengan JPU yang merasa telah cukup menghadirkan saksi maka majelis hakim mempersilakan tim kuasa hukum Ahok mendatangkan saksi yang meringankan.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, karena JPU tidak keberatan saksi ahli yang belum memberikan keterangan tidak perlu dihadirkan, mengingat pekan depan adalah kesempatan terakhir JPU menghadirkan saksi. Maka dari tim penasihat hukum Ahok akan menghadirkan saksi yang meringankannya pada sidang lanjutan kasus penistaan terhadap agama. Saksi yang telah disiapkan antara lain adalah saksi fakta dan saksi ahli untuk Ahok.

Tabel 3.2.11. Analisis *Diagnose Causes* Pemberitaan 11

Media Massa	Diagnose Causes
Tempo	Ahok meresmikan penetapan makam Mbah Priok sebagai salah satu cagar budaya
Republika	Ahok meninjau lahan yang akan dibangun masjid dan pengobatan klinik pengobatan Syech Sayyid Mbah Priok

Pada analisis pemberitaan ini, dari hasil diatas *diagnose causes* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, pada sabtu pagi 4 Maret 2017 Basuki Tjahaja Purnama mendatangi makam Mbah Priok yang berada di Koja, Jakarta Utara. Kedatangan Ahok ini dikarenakan untuk meresmikan penetapan makam Mbah Priok sebagai salah satu cagar budaya. Makam Mbah Priok yang sempat memiliki masalah kepemilikan tanah dengan Pemprov kini kawasan ini dilindungi undang-undang, karena menjadi salah satu cagar budaya yang dijaga keberadaannya.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, Basuki Tjahaja Purnama mengunjungi makam Habib Hasan Bin Muhammad Al Hadad (Mbah Priok) pada sabtu pagi. Dalam kunjungan ini Ahok meninjau lahan yang akan dibangun masjid dan pengobatan klinik pengobatan Syech Sayyid Mbah Priok.

Tabel 3.2.12. Analisis *Diagnose Causes* Pemberitaan 12

Media Massa	Diagnose Causes
Tempo	Molornya acara pleno yang diadakan KPU membuat Ahok dan Djarot memutuskan keluar dari ruang pleno
Republika	Basuki Tjahaja Purnama keberatan karena acara pleno yang akan digelar terlambat satu jam

Pada analisis pemberitaan ini, dari hasil diatas *diagnose causes* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat meninggalkan acara penetapan pasangan calon gubernur DKI yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta karena acara tersebut menyalahi jam penyelenggaraan. Molornya acara pleno yang diadakan KPU membuat Ahok dan Djarot memutuskan keluar dari ruang pleno. Ahok dan Djarot pergi meninggalkan acara untuk menghadiri acara lainnya, acara pernikahan yang diadakan diwaktu yang sama.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, perginya Calon Gubernur pejawat DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama dari acara Penetapan Pasangan Calon Pada

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dikarenakan oleh Ahok keberatan karena acara pleno yang akan digelar terlambat satu jam. Ahok pergi dari acara pleno untuk menghadiri undangan pernikahan yang harus dipenuhi pada hari yang sama.

Tabel 3.2.13. Analisis *Diagnose Causes* Pemberitaan 13

Media Massa	Diagnose Causes
Tempo	Analta Amir pernah hadir ketika ada pemeriksaan saksi di persidangan kasus dugaan penistaan agama
Republika	Andi Analta Amir pernah datang ke persidangan kasus dugaan penistaan agama sebelumnya

Pada analisis pemberitaan ini, dari hasil diatas *diagnose causes* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, dihadirkannya Analta Amir oleh tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama membuat JPU keberatan. Jaksa Panuntut Umum keberatan karena Analta yang merupakan kakak angkat Ahok pernah hadir ketika ada pemeriksaan saksi di persidangan kasus dugaan penistaan agama. Sesuai peraturan saksi tidak boleh saling berhubungan dengan saksi lainnya. Selain itu, JPU khawatir akan ada cacat hukum apabila persidangan terus dilanjutkan dengan diterimanya Analta.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, majelis hakim menolak Andi Analta Amir yang dihadirkan pengacara Ahok karena pernah datang ke persidangan kasus dugaan penistaan agama sebelumnya. Karena dalam KUHP saksi hanya dilarang bercakap-cakap dengan saksi lain.

Tabel 3.2.14. Analisis *Diagnose Causes* Pemberitaan 14

Media Massa	Diagnose Causes
Tempo	Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat hadir menyambut Jacob Zuma
Republika	Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat mendampingi Megawati menyambut Jacob Zuma

Pada analisis pemberitaan ini, dari hasil diatas *diagnose causes* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, presiden Afrika Selatan Jacob Zuma datang ke Indonesia bersama rombongan delegasi kenegaraannya. dalam kunjungannya kerumah Megawati Soekarno Putri, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat hadir untuk ikut menyambut Jacob Zuma.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, Megawati menyambut kunjungan Presiden Afrika Selatan, Jacob Zuma. Pada kesempatan itu, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat mendampingi Megawati dalam menyambut Jacob Zuma. Kunjungan Presiden Afrika Selatan tersebut dikatakan bukan sebagai kunjungan yang bicara dari negara ke negara, melainkan kunjungan pada level yang lain.

Tabel 3.2.15. Analisis *Diagnose Causes* Pemberitaan 15

Media Massa	Diagnose Causes
Tempo	Saksi ahli yang dihadirkan kuasa hukum Ahok pernah diperiksa oleh jaksa penuntut umum dalam penyidikan kasus dugaan penistaan agama
Republika	Keterangan yang diberikan oleh saksi ahli berbeda-beda dan dinilai penuh keragu-raguan

Pada analisis pemberitaan ini, dari hasil diatas *diagnose causes* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, Jaksa Penuntut Umum mempersoalkan saksi ahli hukum pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Edward Omar Sharif Hiariej dikarenakan saksi ahli tersebut pernah diperiksa oleh jaksa penuntut umum dalam penyidikan kasus dugaan penistaan agama. Lebih lanjut, JPU menilai kuasa hukum Ahok tidak etis menghadirkan ahli hukum pidana yang sebelumnya telak memiliki kontak langsung dengan JPU.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memilih untuk tidak menghadirkan saksi ahli Edward Omar Haritjh disebabkan karena keterangan yang diberikan oleh saksi ahli berbeda-beda dan dinilai penuh

keragu-raguan. Keterangan saksi ahli hukum pidana di sidang Basuki Tjahaja Purnama atas kasus dugaan penistaan agama ini juga dianggap tidak jelas oleh JPU.

Tabel 3.2.16. Analisis *Diagnose Causes* Pemberitaan 16

Media Massa	Diagnose Causes
Tempo	Secara Simbolis keluarga Cak Nur menitikpkan nilai-nilai yang selama ini diperjuangkan oleh Cak Nur jika Ahok terpilih menjadi gubernur
Republika	Keluarga Cak Nur menitikpkan pikiran Cak Nur untuk memperjuangkan nilai bahwa Indonesia bukanlah negara agama, tetapi negara yang menjunjung kebangsaan

Pada analisis pemberitaan ini, dari hasil diatas *diagnose causes* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, Basuki Tjahaja Purnama mendapat oleh-oleh buku saat berkunjung ke kediaman mantan dosen yang pernah mengajarnya Ommy Komariah Madjid, yang merupakan istri mendiang cendekiawan muslim Nurcholis Madjid. Melalui itu, secara Simbolis keluarga Cak Nur menitikpkan nilai-nilai yang selama ini diperjuangkan oleh Cak Nur jika Ahok terpilih menjadi gubernur. Buku tersebut berisi tentang pemikiran-pemikiran Cak Nur, terutama tentang kehidupan bertoleransi.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, Basuki Tjahaja Purnama menyambangi kediaman keluarga mendiang Nurcholis Madjid, kedatangannya untuk bersilaturahmi serta menjenguk istri dari mendiang Nurcholis Madjid. Dalam kesempatan itu Ahok diberi buku-buku sebagai simbol keluarga Cak Nur menitikpkan pikiran Cak Nur, untuk memperjuangkan nilai bahwa Indonesia bukanlah negara agama, tetapi negara yang menjunjung kebangsaan.

Tabel 3.2.17. Analisis *Diagnose Causes* Pemberitaan 17

Media Massa	Diagnose Causes
Tempo	Program Ok Otrip mirip dengan program Ahok yang mengintegrasikan Transjakarta dengan angkutan umum KWK
Republika	Banyak program Anies yang ditiru Ahok, salah satunya program Ok Otrip

Pada analisis pemberitaan ini, dari hasil diatas *diagnose causes* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, Ahok menegaskan program Ok Otrip yang merupakan integrasi Transjakarta dengan angkutan umum massal hanya mencontoh program yang sudah ada. Program yang dirancang untuk mengurangi kemacetan itu untuk menjangkau warga di pelosok Jakarta mirip dengan program Ahok yang telah diwujudkan sebelum Anies ingin untuk maju sebagai calon Gubernur.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, Basuki Tjahaja Purnama geram disebut meniru program yang dicetuskan pasangan calon nomor urut tiga, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Dikarenakan banyak program Anies yang dianggap ditiru Ahok, salah satunya program Ok Otrip. Anies tidak mempersalahkan, dan menyuruh untuk masyarakat yang menilai sendiri, karena masyarakat yang memperoleh manfaat dari program tersebut.

Tabel 3.2.18. Analisis *Diagnose Causes* Pemberitaan 18

Media Massa	Diagnose Causes
Tempo	RR kedapatan membawa sebuah sangkur atau pisau di dalam tas
Republika	RR relawan Ahok didapati membawa senjata tajam jenis sangkur

Pada analisis pemberitaan ini, dari hasil diatas *diagnose causes* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, pada pelaksanaan sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama perempuan berinisial RR diamankan pihak

keaman. Perempuan ini dilarang memasuki ruang sidang kasus penodaan agama karena kedapatan membawa sebuah sangkur atau pisau di dalam tasnya. Senjata tajam tersebut ditemukan saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas diluar gedung persidangan.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, wanita beratribut relawan Ahok berinisial RR diamankan petugas keamanan. Wanita tersebut diamankan karena didapati membawa senjata tajam jenis sangkur. Relawan Ahok tersebut ditangkap di gedung Auditorium Kementerian Pertanian dan langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengapa dia membawa sangkur.

Tabel 3.2.19. Analisis *Diagnose Causes* Pemberitaan 19

Media Massa	Diagnose Causes
Tempo	Melihat ibu-ibu yang tidak merespons Ahok melontarkan pendapatnya mengenai Surat Al-Maidah ayat 51
Republika	Warga kurang respon Ahok menganggap ada selebaran larangan memilih pemimpin non-Muslim yang mengutip surat Al-Maidah

Pada analisis pemberitaan ini, dari hasil diatas *diagnose causes* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, dalam pidatonya tentang budidaya perikanan Basuki Tjahaja Purnama melontarkan ucapan tentang Al Maidah 51 karena melihat respon ibu-ibu. Melihat ibu-ibu yang tidak merespons Ahok menganggap orang tersebut suka dengan programnya tetapi pasti berhubungan dengan keyakinannya.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, Basuki Tjahaja Purnama beralasan teringat dengan surat Al-Maidah ayat 51 ialah setelah melihat tidak antusias para ibu di sosialisasi budidaya ikan kerapu di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Karena warga kurang respon Ahok menganggap ada selebaran larangan memilih pemimpin non-Muslim yang mengutip surat Al-Maidah. Selain itu karena sering

di demo oleh ormas-ormas keagamaan Ahok menilai pasti ada aspek keagamaan yang digunakan untuk menjegal dirinya.

Tabel 3.2.20. Analisis *Diagnose Causes* Pemberitaan 20

Media Massa	Diagnose Causes
Tempo	Ahok menziarahi makam ayahnya, Indra Tjahaja Purnama di Belitung
republika	Ahok pulang kampung dalam rangka ziarah ke makam Ayahanda Indra Tjahaja Purnama

Pada analisis pemberitaan ini, dari hasil diatas *diagnose causes* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, memanfaatkan waktu cuti Basuki Tjahaja Purnama pulang ke kampung halamannya di Manggar, Belitung untuk menziarahi makam ayahnya, Indra Tjahaja Purnama. Ahok tetap menjadi pejabat dan berziarah ke makam ayahnya karena teringat pesan ayahnya “orang miskin enggak menang lawan orang kaya, tapi orang kaya enggak akan menang lawan pejabat. Kalau kamu jadi pejabat, lawan mereka (pejabat) yang korup”.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, Basuki Tjahaja Purnama pulang ke kampung halamannya di Bangka Belitung. Sampai hari pencoblosan sangatlah pendek untuk itu Ahok pulang kampung dalam rangka ziarah ke makam Ayahanda Indra Tjahaja Purnama. Kepulangan Ahok tanpa didampingi istrinya Veronica Tan, karena waktu itu Veronica justru menjenguk warga di Manggarai, Jakarta Selatan.

3.3. Analisis *Make Moral Judgement*

Tabel 3.3.1. Analisis *Make Moral Judgement* Pemberitaan 1

Media Massa	Make Moral Judgement
Tempo	Lahan sepanjang bantaran sungai diperlukan untuk program normalisasi meliputi pemancangan turap, parapet, jalan inspeksi, dan dinding penahan tanah yang akan menghindarkan daerah tersebut dari ancaman banjir luapan sungai Ciliwung
Republika	Warga yang tinggal dipinggiran sungai belum menerima adanya pemberitahuan akan proyek normalisasi di daerah mereka

Pada analisis pemberitaan yang pertama, dari hasil diatas *make moral judgement* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, lahan sepanjang bantaran sungai diperlukan untuk program normalisasi meliputi pemancangan turap, parapet, jalan inspeksi, dan dinding penahan tanah yang akan menghindarkan daerah tersebut dari ancaman banjir luapan sungai Ciliwung. Dengan lahan sekitar 700 meter mulai dari jembatan Bukit Duri sampai Komplek Garuda, jika berhasil di normalisasi akan membuat daerah sekitar SMA 8 aman dari banjir. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Iskandar yang diwawancarai Tempo. Melalui pemberitaan ini Tempo memberikan gambaran bahwa dengan pemindahan warga yang tinggal di area sekitaran sungai Ciliwung, sesungguhnya merupakan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi banjir yang sering terjadi di kawasan Jakarta. Tidak lain program tersebut ditujukan untuk lebih mensejahterakan masyarakat dan menjamin keamanan dari ancaman banjir yang selalu terjadi di Jakarta.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, warga yang tinggal dipinggiran sungai belum menerima adanya pemberitahuan akan proyek normalisasi di daerah mereka. Namun warga akan mengikuti anjuran pemerintah bila diberi arahan dan instruksi yang jelas. Pernyataan tersebut disampaikan oleh beberapa warga yang tinggal di area sekitaran sungai Ciliwung, Rantiyah dan Ida yang diwawancarai

oleh Republika. Melalui pemberitaan ini Republika memberikan gambaran bahwa program yang dicanangkan Ahok belum sepenuhnya tersampaikan pada elemen masyarakat yang paling bawah. Oleh sebab itu maka sudah seharusnya bagi Ahok untuk lebih bisa menjalankan program dan menjamin mampu mencapai pada elemen masyarakat yang paling bawah sehingga semua warga DKI Jakarta mampu menikmati merasakan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dibuat untuk mensejahterakan masyarakat.

Tabel 3.3.2. Analisis *Make Moral Judgement* Pemberitaan 2

Media Massa	Make Moral Judgement
Tempo	Presiden Joko Widodo meminta agar sabar menunggu keputusan hukum formal. Karena yang banyak beredar saat ini hanyalah argumentasi pribadi saja, yang tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Untuk itu Presiden Joko Widodo menunggu fatwa MA atau Keputusan PTUN atas kasus dugaan penistaan agama
Republika	Presiden akan mengambil sikap tegas sesuai dengan peraturan serta hukum dan keputusan dari lembaga tinggi hukum. Karena yang banyak berkembang saat ini adalah argumentasi-argumentasi individual dari para ahli hukum dan itu argumentasinya berbeda-beda dan <i>debatable</i>

Pada analisis pemberitaan yang kedua, dari hasil diatas *make moral judgement* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, Presiden Joko Widodo meminta agar sabar menunggu keputusan hukum formal. Karena yang banyak beredar saat ini hanyalah argumentasi pribadi saja, yang tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Untuk itu Presiden Joko Widodo menunggu fatwa MA atau Keputusan PTUN atas kasus dugaan penistaan agama. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Simanjuntak. Melalui pemberitaan ini Tempo memberikan gambaran bahwa Presiden Joko Widodo bersikap netral dalam menanggapi kasus dugaan penistaan agama yang berkaitan dengan salah satu anggota dari partai yang sama

dengannya serta pernah menjadi wakilnya semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, yaitu Basuki Tjahaja Purnama. Meskipun memiliki kedekatan dengan Ahok, dari pemberitaan tersebut Tempo menilai Presiden Joko Widodo bersikap tanpa memihak dan lebih mengutamakan untuk menunggu keputusan hukum yang kuat sebelum mengambil tindakan untuk turut ikut campur dalam permasalahan tersebut. Untuk itu tergambar Presiden Joko Widodo yang tetap mementingkan kepentingan rakyat banyak dengan tidak memberikan campur tangan tanpa alasan yang jelas pada kasus-kasus yang sedang dipersidangkan di persidangan.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, Presiden Joko Widodo akan mengambil sikap tegas sesuai dengan peraturan serta hukum dan keputusan dari lembaga tinggi hukum. Karena yang banyak berkembang saat ini adalah argumentasi-argumentasi individual dari para ahli hukum dan itu argumentasinya berbeda-beda dan *debatable*. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Ansar Simanjuntak. Melalui pemberitaan tersebut Republika menggambarkan bahwa Presiden Joko Widodo akan bersikap hati-hati dan tegas dalam menanggapi kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama. Presiden Joko Widodo akan menunggu keputusan dari lembaga tinggi hukum, sebelum ikut campur tangan dalam permasalahan tersebut. Karena pada permasalahan tersebut dinilai telah banyak kalangan yang memaksa ikut campur dengan argumentasinya yang berbeda-beda, sehingga apa yang sebenarnya terjadi juga belum bisa diyakini.

Tabel 3.3.3. Analisis *Make Moral Judgement* Pemberitaan 3

Media Massa	Make Moral Judgement
Tempo	Makna substansi dua kasus tersebut benar. Tapi, dalam kasus Ahok, orang yang menggunakan Surat Al-Maidah dan orang yang mengingatkan juga sama-sama salah karena saling mempolitisasi ayat tersebut. Karena ada kata “dibohongi” dalam ucapan Ahok di Kepulauan Seribu itu, artinya menjadi salah. Sebab, kata “bohong” yang ditempelkan pada surat atau Al-Quran sudah bermakna negatif
Republika	Berdasarkan hukum acara pidana, hakim tidak pernah terikat pada keterangan ahli sama sekali. Untuk itu keterangan yang diberikan saksi MUI tidak akan memberatkan Ahok. Sehingga tidak ada pengaruhnya bila tidak menanyakan keterangan kepada saksi ahli

Pada analisis pemberitaan yang ketiga, dari hasil diatas *make moral judgement* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, makna substansi dua kasus tersebut benar. Tapi, dalam kasus Ahok, orang yang menggunakan Surat Al-Maidah dan orang yang mengingatkan juga sama-sama salah karena saling mempolitisasi ayat tersebut. Karena ada kata “dibohongi” dalam ucapan Ahok di Kepulauan Seribu itu, artinya menjadi salah. Sebab, kata “bohong” yang ditempelkan pada surat atau Al-Quran sudah bermakna negatif. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Miftachul Akhyar. Melalui pemberitaan tersebut Tempo memberikan gambaran bahwa meskipun Ahok dalam pidatonya di Kepulauan Seribu tidak memiliki niat untuk melakukan penistaan agama, tetapi melalui sedikit perkataannya yang berkonotasi negatif mampu membuatnya menjadi terdakwa. Oleh karena itu dari berita Tempo menggambarkan bahwa melalui satu dua patah kata saja mampu membuat seseorang menjadi pihak yang bersalah. Untuk itu maka, bila tidak memahami secara mendalam terhadap aspek yang dibicarakan, alangkah baik untuk mencoba menghindari penggunaan kata yang berkesan negatif terhadap

topik yang dibicarakan. Selain itu Tempo juga menggambarkan bagaimana sebuah tindakan saja mampu meruntuhkan citra masyarakat terhadap seorang tokoh, bahkan sampai mampu membuatnya terjerat dalam masalah hukum yang serius.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, berdasarkan hukum acara pidana, hakim tidak pernah terikat pada keterangan ahli sama sekali. Untuk itu keterangan yang diberikan saksi MUI tidak akan memberatkan Ahok. Sehingga tidak ada pengaruhnya bila tidak menanyakan keterangan kepada saksi ahli. Pernyataan tersebut disampaikan oleh salah satu dari tim penasihat hukum terdakwa kasus dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, I Wayan Sudirta. Melalui pemberitaan ini Republika menggambarkan bahwa pihak Ahok menganggap apapun yang dikatakan oleh saksi dari MUI tidak akan berefek kepada kasus dugaan penistaan agama. Pihak Ahok menilai MUI tidak objektif dalam memberikan keterangan dalam persidangan, karena Ahok ditetapkan sebagai pelaku penistaan agama merupakan produk yang dibuat oleh MUI. Melalui pemberitaan ini pula Republika menggambarkan pihak Ahok tidak mau mengajukan pertanyaan terhadap saksi karena cukup yakin bahwa keterangan saksi tidak cukup lebih memberatkan lagi bagi Ahok.

Tabel 3.3.4. Analisis *Make Moral Judgement* Pemberitaan 4

Media Massa	Make Moral Judgement
Tempo	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menyiapkan sejumlah antisipasi untuk warga DKI yang mengungsi akibat banjir. Seperti kalau ada bayi di tempat pengungsian ada air panas, supaya gampang buat susu, <i>pampers</i> , segala macam
Republika	Meski tidak sempat meninjau lokasi banjir karena persidangan, dipastikan setiap pengungsian dilengkapi dengan air panas. Agar ibu-ibu bisa membuat susu kepada anak-anaknya

Pada analisis pemberitaan yang keempat, dari hasil diatas *make moral judgement* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta sudah menyiapkan sejumlah antisipasi untuk warga DKI yang mengungsi akibat banjir. Seperti kalau ada bayi di tempat pengungsian ada air panas, supaya gampang buat susu, *pampers*, segala macam. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Basuki Tjahaja Purnama se usai menjalani persidangan lanjutan kasus dugaan penistaan agama kepada wartawan Tempo. Melalui pemberitaan tersebut Tempo memberi gambaran bahwa meskipun sedang fokus dalam menjalani persidangan kasus yang menjerat, Ahok tetap memberikan kinerja yang sebisa mungkin untuk membantu masyarakat yang terkena banjir. Ahok menilai banjir bisa terjadi karena dia tidak bisa bekerja secara maksimal, karena waktunya terbagi dengan harus menjalani persidangan. Untuk itu Ahok berusaha penuh untuk tetap memberikan yang terbaik bagi warga yang sedang berada di pengungsian karena terkena banjir. Karena Ahok menganggap bahwa dia ada sebagai Gubernur ditujukan untuk bekerja bagi seluruh warganya.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, meskipun tidak sempat meninjau lokasi banjir karena persidangan, dipastikan setiap pengungsian dilengkapi dengan air panas. Agar ibu-ibu bisa membuat susu kepada anak-anaknya. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Basuki Tjahaja Purnama setelah persidangan lanjutan kasusudugaan penodaan agama selesai digelar di Auditorium Kementerian Pertanian. Melalui pemberitaan ini Republika menggambarkan bahwa Ahok tidak sempat meninjau lokasi yang terkena banjir serta tempat pengungsian sementara karena menjani persidangan. Namun, Ahok memastikan bahwa di setiap pengungsian tersedia air panas untuk memudahkan pengungsi jika mengurus bayi, dsb. Hal ini karena Ahok telah meminta kepada timnya untuk menyiapkan air panas, di semua tempat yang digunakan sebagai tempat pengungsian sementara warga yang terkena banjir.

Tabel 3.3.5. Analisis *Make Moral Judgement* Pemberitaan 5

Media Massa	Make Moral Judgement
Tempo	Para pelapor Ahok terhadap kasus penodaan agama tidak ada satupun dari warga di Kepulauan Seribu. Mereka mempunyai hak untuk melaporkan Ahok, karena kepentingan mereka terganggu terkait dengan kitab suci yang mereka imani itu telah dinodai
Republika	Para pelapor Ahok atas kasus penodaan agama tidak ada satupun dari warga di Kepulauan Seribu. Mereka mempunyai hak untuk melaporkan Ahok, karena kepentingan mereka terganggu terkait dengan kitab suci yang mereka imani itu telah dinodai

Pada analisis pemberitaan yang kelima, dari hasil diatas *make moral judgement* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, para pelapor Ahok terhadap kasus penodaan agama tidak ada satupun dari warga di Kepulauan Seribu. Mereka mempunyai hak untuk melaporkan Ahok, karena kepentingan mereka terganggu terkait dengan kitab suci yang mereka imani itu telah dinodai. Pernyataan tersebut diaktakan oleh ahli pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakkir dalam persidangan kasus dugaan penistaan agama. Melalui pemberitaan ini Tempo memberikan gambaran bahwa, meskipun Ahok melakukan pidato di Kepulauan Seribu tetapi bukan warga dari Kepulauan Seribu yang melaporkannya. Apa yang dikatakan Ahok dalam pidatonya, memiliki efek yang besar dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Pihak-pihak yang merasa keyakinannya telah dinodai oleh Ahok inilah yang kemudian melaporkan Ahok atas dugaan penistaan agama yang dilakukannya saat berpidato pada kunjungan kerja di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu. Itu berarti bahwa pihak-pihak yang melaporkan Ahok ini, hanya melihat pidato yang dilakukan Ahok melalui video pidato Ahok yang telah disebarokan tertentu.

Selanjutnya dari sisi Republika hampir serupa dengan Tempi yaitu, para pelapor Ahok atas kasus penodaan agama tidak ada satupun dari warga di

Kepulauan Seribu. Mereka mempunyai hak untuk melaporkan Ahok, karena kepentingan mereka terganggu terkait dengan kitab suci yang mereka imani itu telah dinodai. Pernyataan tersebut dituturkan oleh ahli pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakkir pada kesaksiannya di persidangan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa, Basuki Tjahaja Purnama. Melalui pemberitaan tersebut Republika menggambarkan bahwa sebenarnya dalam kasus yang menjerat Ahok banyak pihak yang melaporkannya kepada pihak berwajib. Bahwakan pihak-pihak yang melaporkan Ahok tersebut tidak dari Kepulauan Seribu dimana Ahok melakukan pidatonya, melainkan dari pihak di luar Kepulauan Seribu. Pihak-pihak ini melaporkan Ahok karena merasa bahwa Ahok telah menodai kitab suci yang mereka imani. Untuk itulah maka masyarakat merasa tergerak untuk melaporkan Ahok atas tindakannya tersebut.

Tabel 3.3.6. Analisis *Make Moral Judgement* Pemberitaan 6

Media Massa	Make Moral Judgement
Tempo	Lebih memilih kerja, Ahok mengatakan sebenarnya rugi kalau lebih memilih kerja. Kan, enak kalau cuti, bisa kampanye, keliling-keliling ke mana-mana
Republika	Ahok mengatakan tidak tahu jadwal cuti, dan tidak memikirkannya. Ahok memilih memikirkan kerja, meskipun menurutnya justru kalau cuti lebih enak kampanye, keliling-keliling kemana-mana

Pada analisis pemberitaan yang keenam, dari hasil diatas *make moral judgement* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, untuk lebih memilih kerja, Ahok mengatakan sebenarnya rugi kalau lebih memilih kerja. Kan, enak kalau cuti, bisa kampanye, keliling-keliling ke mana-mana pernyataan tersebut disampaikan oleh Ahok kepada wartawan Tempo. Melalui pemberitaan ini Tempo memberikan gambaran bahwa untuk menjelang Pilkada DKI Jakarta utaran kedua, Ahok lebih memilih untuk bekerja secara maksimal untuk menunjukkan bagaimana hasil kerjanya semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dengan menunjukkan hasil kerja nyata ini, maka akan lebih dapat

membuat masyarakat yakin dan percaya akan kinerja pemimpinnya. Masyarakat yang merasa percaya bahwa pemimpinnya bekerja untuk mengabdikan kepada rakyat, maka cenderung akan membuat masyarakat nyaman dan mantap memilihnya kembali untuk jabatan selanjutnya.

Selanjutnya dari sisi *Republika* ialah, Ahok mengatakan tidak tahu jadwal cuti, dan tidak memikirkannya. Ahok memilih memikirkan kerja, meskipun menurutnya justru kalau cuti lebih enak kampanye, keliling-keliling kemana-mana pernyataan tersebut disampaikan Ahok dalam sela-sela waktu meninjau sebuah proyek. Melalui pemberitaan tersebut *Republika* menggambarkan bahwa Ahok tidak terlalu memikirkan akan masa cuti untuk kampanye Pilkada. Ahok lebih memikirkan kerja yang optimal untuk menyelesaikan program-program yang telah dijadwalkan. Meskipun demikian, melalui kampanye dengan berkeliling satu tempat ke tempat lain juga mampu dimanfaatkan untuk lebih mengetahui permasalahan yang dihadapi warga Jakarta.

Tabel 3.3.7. Analisis *Make Moral Judgement* Pemberitaan 7

Media Massa	Make Moral Judgement
Tempo	Ahok belum mengetahui apakah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan turut serta dalam melakukan penyambutan Raja Salman, yang akan mengunjungi Indonesia dan dijemput langsung oleh Presiden Joko Widodo
Republika	Ahok dan Djarot belum mengetahui apakah terdapat rencana untuk bertemu dengan Raja Salman yang melakukan kunjungan ke Indonesia

Pada analisis pemberitaan yang ketujuh, dari hasil di atas *make moral judgement* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, Basuki Tjahaja Purnama belum mengetahui apakah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan turut serta dalam melakukan penyambutan Raja Salman, yang akan mengunjungi Indonesia dan dijemput langsung oleh Presiden Joko Widodo. Ahok tidak mengetahui secara rinci rencana penyambutan Raja Salman, karena hal tersebut diatur oleh biro KDH. Pernyataan tersebut dikatakan oleh Ahok saat meninjau

proyek Asian Games 2018 di Velodrome, Jakarta. Melalui pemberitaan tersebut Tempo memberikan gambaran Ahok masih belum pasti ikut dalam penyambutan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud. Namun Ahok masih berkemungkinan untuk turut ikut dalam penyambutan tersebut. Dengan adanya kondisi keagamaan yang tidak kondusif di Jakarta terkait kasus yang menjerat Ahok menjelang diadakannya Pilkada. Jika Ahok turut ikut menyambuk Raja Salman, maka setidaknya akan sedikit meredakan kondisi yang kurang kondusif tersebut.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, Ahok dan Djarot belum mengetahui apakah terdapat rencana untuk bertemu dengan Raja Salman yang melaukan kunjungan ke Indonesia. Pasangan inkumben ini tidak memiliki rencana untuk bertemu Raja Salman. Karena yang menyambut Raja Salman adalah Presiden Joko Widodo. Namun baik Ahok maupun Djarot bersedia untuk mendampingi dalam penyambuta tersebut, bila terdapat undangan untuk turut ikut dalam penyambutan tersebut. Pernyataan ini dituturkan oleh Ahok kepada wartawan Republika, melalui ini Republika menggambarkan bahwa Ahok masih belum tahu dan menunggu undangan untuk ikut dalam penyambutan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud. Kedatangan Raja Salman sendiri membuat mayoritas masyarakat Indonesia ikut antusias dalam menunggu kedatangannya. Banyak kalangan masyarakat yang merasa ikut berbahagia dengan kedatangan Raja Salam ke Indonesia, meskipun tidak bisa menemui secara langsung.

Tabel 3.3.8. Analisis *Make Moral Judgement* Pemberitaan 8

Media Massa	Make Moral Judgement
Tempo	Baru-baru ini papan reklame yang hanya berjarak sekitar 20 meter yaitu di depan Rumah Sakit Harapan Kita dan di depan Menara Peninsula, Jakarta Barat roboh pada waktu yang hampir bersamaan pada Sabtu, 25 Februari 2017
Republika	Menurut informasi TMC Polda Metro Jaya pada Sabtu malam sebuah baliho berukuran besar roboh dan menimpa taksi di Jalan S Parman, Slipi, Jakarta Barat, tepatnya di depan RS Harapan Kita

Pada analisis pemberitaan yang kedelapan, dari hasil diatas *make moral judgement* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, baru-baru ini papan reklame yang hanya berjarak sekitar 20 meter yaitu di depan Rumah Sakit Harapan Kita dan di depan Menara Peninsula, Jakarta Barat roboh pada waktu yang hampir bersamaan pada Sabtu, 25 Februari 2017. Peristiwa jatuhnya papan reklame itu diduga karena hujan deras dan angin kencang. Terkait kembali robohnya papan reklame di Jakarta, Ahok menyatakan tidak akan memberikan izin pemasangan papan reklame lagi di Ibu Kota. Pernyataan ini diampaikan oleh Ahok untuk menanggapi peristiwa reklame yang kembali roboh dan membahayakan pengguna jalan di Jakarta. Melalui pemberitaan tersebut Tempo memberikan gambaran bahwa Ahok cukup tanggap dalam menanggapi peristiwa-peristiwa yang terjadi diwilayah kepemimpinannya. Selain itu, Ahok juga mau membuat peraturan tegas yang mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan dengan tidak memberikan izin pemasangan reklame. Dengan beberapa kali reklame roboh dan memakan korban jiwa, maka Ahok menilai bahwa reklame yang membahayakan warganya memang patut untuk dihentikan pemasanganya dan digantikan dengan yang lebih modern dan aman.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, menurut informasi TMC Polda Metro Jaya pada Sabtu malam sebuah baliho berukuran besar roboh dan menimpa taksi di Jalan S Parman, Slipi, Jakarta Barat, tepatnya di depan RS Harapan Kita. Reklame yang roboh ini mengakibatkan lalu lintas tidak bisa dilintasi pada saat itu. Menganggapi kejadian ini Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama berencana akan membuat peraturan yang tegas terkait pemasangan reklame. Karena menurut Ahok sanksi yang selama diterapkan belum tegas, dan bila papan reklame itu roboh karena angin atau hujan, maka tidak ada sanksi untuk pemilik dan pengembang reklame tersebut. Untuk itu maka Ahok berencana untuk merapikan dan menebang reklame yang disinyalir membahayakan pengguna jalan. Pernyataan tersebut dituturkan Ahok saat diwawancarai wartawan Republika. Melalui pemberitaan ini Republika menggambarkan bahwa Ahok

cukup tanggap dalam mengatasi permasalahan reklame yang membahayakan, hal itu diwujudkan dengan akan membuat peraturan yang lebih tegas terkait pemasangan reklame. Lalu, Ahok juga cukup tegas dalam mengatasinya dengan cara akan merapikan dan menebang reklame yang membahayakan pengguna jalan dan warga Jakarta.

Tabel 3.3.9. Analisis *Make Moral Judgement* Pemberitaan 9

Media Massa	Make Moral Judgement
Tempo	Ada motif personal dalam keterangan Rizieq Shihab sebagai saksi ahli. Di dalam pengadilan semua mata bisa melihat, gestur yang dilakukan Rizieq bisa dipastikan menunjukkan ada masalah pribadi
Republika	Siapapun yang melakukan penodaan agama harus diproses secara hukum. Bukan hanya Ahok saja, melainkan juga orang Islam sekalipun jika melakukan penodaan agama harus diproses secara hukum, karena mereka melanggar KUHP

Pada analisis pemberitaan yang kesembilan, dari hasil diatas *make moral judgement* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, ada motif personal dalam keterangan Rizieq Shihab sebagai saksi ahli. Di dalam pengadilan semua mata bisa melihat, gestur yang dilakukan Rizieq bisa dipastikan menunjukkan ada masalah pribadi. Hal ini bukan lagi menjadi rahasia umum, melainkan sudah menjadi sebuah fakta, pernyataan ini disampaikan oleh kuasa hukum Ahok, Humphrey R. Djemat seusai persidangan lanjutan kasus dugaan penistaan agama. Melalui pemberitaan ini Tempo memberikan gambaran bahwa pihak kuasa hukum Ahok menilai adanya unsur subyektif saksi ahli dalam memberikan keterangan dalam persidangan kasus dugaan penistaan agama. Kondisi tersebut diperkuat dengan sikap Rizieq yang hanya menyalami hakim dan tim JPU saja. Selain itu, kedatangan Rizieq sebagai saksi ahli dalam persidangan kasus dugaan penistaan agama tersebut dianggap memiliki motif

personal, karena Rizeq sedang dalam status bermasalah karena terjerat beberapa kasus hukum.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, bahwa siapapun yang melakukan penodaan agama harus diproses secara hukum. Bukan hanya Ahok saja, melainkan juga orang Islam sekalipun jika melakukan penodaan agama harus diproses secara hukum, karena mereka melanggar KUHP dan berhadapan dengan negara. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang dihadirkan sebagai ahli Agama Islam dalam lanjutan sidang kasus penodaan agama. Melalui pemberitaan ini Republika menggambarkan bahwa tidak hanya untuk satu orang, namun untuk semua orang yang melakukan penodaan agama akan diproses secara hukum. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara hukum, sehingga hal-hal yang dinilai melanggar dan menodai banyak pihak maka hal tersebut akan diselesaikan secara hukum. Bahkan bukan hanya Ahok saja, melainkan juga semua orang baik beragama apapun maupun tidak beragama bila melakukan penodaan terhadap satu agama, maka yang menjadi ganjarannya adalah ditindak secara hukum. Karena hal-hal tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Tabel 3.3.10. Analisis *Make Moral Judgement* Pemberitaan 10

Media Massa	Make Moral Judgement
Tempo	Jaksa Penuntut Umum merasa telah cukup menghadirkan saksi dalam persidangan, selanjutnya JPU tidak akan menghadirkan saksi lagi. Pada persidangan berikutnya langsung kepada penasihat hukum untuk menghadirkan saksi atau saksi fakta yang meringankan
Republika	Majelis Hakim mempersilahkan tim penasihat hukum menghadirkan para saksi pada pekan depan. Karena JPU sudah tidak ingin menggunakan haknya untuk mendatangkan saksi. Maka persidangan berikutnya langsung kepada penasihat hukum untuk menghadirkan saksi atau saksi fakta yang meringankan

Pada analisis pemberitaan yang kesepuluh, dari hasil diatas *make moral judgement* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, Jaksa Penuntut Umum merasa telah cukup menghadirkan saksi dalam persidangan, selanjutnya JPU tidak akan menghadirkan saksi lagi. Pada persidangan berikutnya langsung kepada penasihat hukum untuk menghadirkan saksi atau saksi fakta yang meringankan, sebelum menghadirkan saksi ahli. Majelis hakim yang dipimpin Dwiarso Budi Setianto mempersilakan tim kuasa hukum Ahok mendatangkan saksi yang meringankan dalam persidangan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim, Dwiarso Budi Setianto yang disampaikan pada akhir persidangan kasus dugaan penistaan agama yang digelar di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta. Melalui pemberitaan ini Tempo memberi gambaran bahwa Majelis Hakim dalam persidangan bersikap netral dengan menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Untuk itu Majelis Hakim mempersilahkan untuk menghadirkan saksi-saksi yang meringankan sesuai dengan prosedur persidangan yang berlaku. Meskipun selama persidangan Majelis Hakim menerima banyak argumentasi, tetapi hakim sudah seharusnya menjadi pihak yang netral dalam menegakkan hukum yang adil.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, Majelis Hakim mempersilahkan tim penasihat hukum menghadirkan para saksi pada pekan depan. Karena JPU sudah tidak ingin menggunakan haknya untuk mendatangkan saksi. Maka persidangan berikutnya langsung kepada penasihat hukum untuk menghadirkan saksi atau saksi fakta yang meringankan. Belum saatnya untuk kedatangan saksi ahli dalam persidangan, karena menghadirkan saksi ahli tidaklah wajib untuk dilakukan. Pernyataan tersebut dituturkan oleh Ketua Majelis Hakim, Dwiarso Budi Santiarto setelah berembuk dengan hakim lainnya dalam persidangan lanjutan kasus dugaan penodaan agama. Melalui pemberitaan ini Republika menggambarkan bahwa pihak Majelis Hakim menjadi pihak yang netral dalam menyelesaikan kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Hakim menjadi aspek penentu apakah terdakwa dianggap bersalah maupun tidak

bersalah, untuk itu maka hakim menjadi sosok yang netral dalam menegakkan keadilan.

Tabel 3.3.11. Analisis *Make Moral Judgement* Pemberitaan 11

Media Massa	Make Moral Judgement
Tempo	Meskipun sempat ada masalah tanah di Pemprov soal makam Mbah Priok, tapi bersyukur karena sekarang sudah selesai dan kawasan tersebut dilindungi oleh undang-undang
Republika	Didoakan umum saja, artinya tidak ada unsur siriknya. Dan semoga kondisi masyarakat yang kondusif tidak diperkeruh. Sebab, Makam Mbah Priok merupakan cagar budaya

Pada analisis pemberitaan ini, dari hasil diatas *make moral judgement* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, meskipun sempat ada masalah tanah di Pemerintah Provinsi soal makam Mbah Priok, tapi bersyukur karena sekarang sudah selesai dan kawasan tersebut dilindungi oleh undang-undang. Peresmian Cagar budaya ini juga ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan Gubernur dari Basuki Tjahaja Purnama kepada Abdullah Sting Alaydrus, yang merupakan keturunan dari Hasan bin Muhammad Al Hadad. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ahok saat diwawancarai oleh Tempo pada kunjungannya ke Makam Mbah Priok. Melalui pemberitaan tersebut Tempo memberikan gambaran bahwa menjaga tempat-tempat yang menjadi warisan budaya itu penting untuk dilakukan. Terlepas dari berbagai macam alasan yang menjadi latar belakang dari kondisi tersebut. Karena dengan tetap terjaganya situs-situs kebudayaan, maka generasi kedepan masih bisa mempelajari dan memahami kebudayaan yang ada sebelumnya. Selain itu, Tempo juga menggambarkan bahwa kegiatan untuk melestarikan situs budaya dan dijadikan cagar budaya merupakan hal yang pantas untuk dilakukan, ini bertujuan untuk melindungi tempat tersebut dari campur tangan pihak luar.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, Basuki Tjahaja Purnama saat berkunjung ke Makam Mbah Priok didoakan secara umum saja, artinya tidak ada

unsur siriknya. Dan semoga kondisi masyarakat yang kondusif tidak diperkeruh. Sebab, Makam Mbah Priok merupakan cagar budaya. Pernyataan tersebut disampaikan oleh kakak angkat Ahok, Andi Analta Amir saat ditemui Republika. Dari pemberitaan tersebut Republika menggambarkan bahwa Ahok didoakan agar terus menjadi Gubernur yang baik pada kunjungannya ke Makam Mbah Priok. Ahok yang datang meninjau lahan yang akan dibangun masjid dan pengobatan klinik pengobatan Syech Sayyid Mbah Priok, disambut dan didoakan oleh keturunan Mbah Priok, Abdullah Sting Alaydrus.

Tabel 3.3.12. Analisis *Make Moral Judgement* Pemberitaan 12

Media Massa	Make Moral Judgement
Tempo	Ketidakprofesionalan dari penyelenggara rapat pleno membuat Ahok dan Djarot menyerahkan sisa acara kepada beberapa tim sukses mereka
Republika	Paslon nomor dua tidak hadir karena Ahok mempunyai acara lain yang harus dipenuhi, yaitu undangan pernikahan warga

Pada analisis pemberitaan ini, dari hasil diatas *make moral judgement* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, ketidakprofesionalan dari penyelenggara rapat pleno membuat Ahok, dan tim sukses menunggu hampir satu jam. Namun karena tidak ada tanda-tanda acara akan dimulai, Djarot pun menyerahkan sisa acara kepada beberapa tim sukses. Dalam penyelenggaraan acara seharusnya semua yang terlibat untuk saling menghargai satu sama lain, pernyataan ini disampaikan oleh Calon Wakil Gubernur, Djarot Saiful Hidayat saat akan meninggalkan acara penetapan pasangan calon gubernur DKI yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Melalui pemberitaan ini Tempo menggambarkan bahwa dengan ketidakprofesionalan dari penyelenggara membuat beberapa pihak merasa dirugikan dan memilih meninggalkan acara. Untuk itu seharusnya memang penyelenggara mampu bertanggung jawab dan memberikan alasan yang jelas jika acara diundur atas alasan tertentu. KPUD DKI Jakarta seharusnya mampu bertindak cepak untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, pasangan calon nomor dua tidak hadir karena Ahok mempunyai acara lain yang harus dipenuhi, yaitu undangan pernikahan warga. Acara molor yang membuat Ahok keberatan dan meninggalkan acara yang belum digelar tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Tim sukses Ahok-Djarot, Fayakhun Andriadi saat diwawancari wartawan Republika. Melalui pemberitaan ini Republika memberikan gambaran bahwa Ahok merasa keberatan karena acara yang dijadwalkan molor hampir satu jam. Selain itu, karena Ahok juga memiliki acara lain untuk dihadiri maka, pasangan calon nomor urut dua memilih untuk pergi meninggalkan acara tersebut. Sehingga hanya tim sukses dari calon nomor dua yang mengikuti acara penetapan pasangan calon gubernur DKI yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat tersebut.

Tabel 3.3.13. Analisis *Make Moral Judgement* Pemberitaan 13

Media Massa	Make Moral Judgement
Tempo	Analta mengakui pernah hadir di persidangan. Namun saat itu Analta tidak mengetahui ada larangan bagi saksi melihat pemeriksaan di persidangan
Republika	Analta datang ke persidangan karena ingin melihat dan mendampingi Ahok. Seperti yang diketahui kebiasaan dalam proses persidangan untuk saksi-saksi dipersilakan untuk keluar sebelum persidangan digelar

Pada analisis pemberitaan ini, dari hasil diatas *make moral judgement* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, Analta mengakui pernah hadir di persidangan. Namun saat itu Analta tidak mengetahui ada larangan bagi saksi melihat pemeriksaan di persidangan. Analta mengaku baru mengetahui peraturan tersebut setelah majelis hakim melarang saksi hadir setelah pemeriksaan tiga orang saksi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Analta, yang mengatakan dirinya pernah hadir sekali di persidangan sebelumnya. Melalui pemberitaan ini Tempo memberikan gambaran bahwa dalam persidangan yang mencari keadilan, maka semua peraturan haruslah dipatuhi

untuk menjaga agar tetap terjadinya persidangan yang adil. Dengan Analta yang telah hadir pada pemeriksaan saksi lainnya, tentu saja hal tersebut melanggar peraturan, untuk itu keputusan majelis hakim sudah tepat untuk menolak Analta dijadikan saksi. Dengan Analta ditolak maka diharapkan persidangan tetap berjalan dengan adil tanpa adanya pelanggaran prosedural.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, Analta datang ke persidangan karena ingin melihat dan mendampingi Ahok. Seperti yang diketahui kebiasaan dalam proses persidangan untuk saksi-saksi dipersilakan untuk keluar sebelum persidangan digelar. Oleh karena itu, Analta lalai tidak diingatkan karena tidak kenal, tetapi kenal tidak kenal kebiasaanya saksi dipersilakan untuk keluar. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Andi Analta Amir diluar ruang persidangan. Melalui pemberitaan tersebut Republika menggambarkan bahwa untuk kebaikan jalannya sidang kasus dugaan penistaan agama, Analta yang pernah hadir pada persidangan sebelumnya tidak diperkenankan memberikan kesaksian. Karena dalam prosedur persidangan telah diatur larangan terkait saksi untuk berhubungan dengan saksi lain, termasuk datang pada persidangan saksi lainnya. Untuk itu sebagai kebiasaan, dalam persidangan biasanya saksi yang belum saatnya memberikan keterangan dipersilahkan untuk keluar ruang sidang. Karena Analta pernah hadir pada persidangan sebelumnya, maka dianggap telah melanggar prosedur, dan memang sepatasnya untuk ditolak kesaksiannya untuk tetap menciptakan persidangan yang baik.

Tabel 3.3.14. Analisis *Make Moral Judgement* Pemberitaan 14

Media Massa	Make Moral Judgement
Tempo	Megawati Soekarno Putri mengundang Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot untuk menemaninya menyambut presiden Afrika Selatan
Republika	Kunjungan Presiden Afrika Selatan ini adalah kunjungan yang bukan bicara dari negara ke negara, tapi kunjungan pada level yang lain

Pada analisis pemberitaan ini, dari hasil diatas *make moral judgement* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, Megawati Soekarno Putri mengundang Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot untuk menemaninya menyambut presiden Afrika Selatan. Pasangan calon gubernur ini turut menyambut Zuma, yang datang bersama rombongan delegasi kenegaraannya karena diminta oleh Megawati untuk ikut hadir. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Melalui pemberitaan tersebut Tempo memberi gambaran bahwa Megawati memberikan perhatian khusus bagi pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saiful Hidayat. Dengan Ahok – Djarot yang hadir dalam menyambut Jacob Zuma menjadi pengenalan hubungan politik dengan negara lain yang lebih baik.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, kunjungan Presiden Afrika Selatan ini adalah kunjungan yang bukan bicara dari negara ke negara, tapi kunjungan pada level yang lain. Megawati mengatakan, dirinya mendapat kehormatan dikunjungi oleh Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri se usai pertemuannya dengan Jacob Zuma. Melalui pemberitaan ini Republika menggambarkan bahwa kunjungan Presiden Afrika Selatan bukanlah sebuah kunjungan yang membahas hal-hal kenegaraan, melainkan hal yang lainnya. Kunjungan ini hanya kunjungan balasan ketika Megawati menduduki jabatan Presiden, juga melakukan kunjungan kenegaraan ke Afrika Selatan. Dalam kunjungan tersebut Megawati bertemu dengan Presiden Afrika Selatan saat itu Thabo Mbeki serta mantan presiden Nelson Mandela.

Tabel 3.3.15. Analisis *Make Moral Judgement* Pemberitaan 15

Media Massa	Make Moral Judgement
Tempo	Kesaksian Edward diputuskan 28 Februari 2017. Saat itu tidak ada keberatan sedikit pun JPU. Namun, tiba-tiba JPU memutuskan untuk keberatan atas saksi Edward
Republika	Edward sebenarnya sejak awal diperiksa di kepolisian untuk diminta keterangan sebagai ahli. Namun, dalam beberapa proses tahapannya itu, saksi ahli memberikan jawaban yang ragu-ragu

Pada analisis pemberitaan ini, dari hasil diatas *make moral judgement* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, kesaksian Edward diputuskan 28 Februari 2017. Saat itu tidak ada keberatan sedikit pun JPU. Namun, tiba-tiba JPU memutuskan untuk keberatan atas saksi Edward. Dengan kondisi seperti ini di buat suatu persoalan, yang menurut kuasa hukum merupakan itikad yang kurang bagus. Selanjutnya kuasa hukum menilai tidak ada yang perlu dipermasalahkan di persidangan lanjutan kasus dugaan penistaan agama. Pernyataan ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama di dalam persidangan. Melalui pemberitaan ini Tempo memberi gambaran bahwa seharusnya tidaklah menjadi suatu masalah mengenai saksi ahli Edward yang dihadirkan oleh kuasa hukum. Karena JPU sendiri memilih untuk tidak menghadirkan Edward dan JPU telah menyatakan saksi yang dihadirkan cukup serta tidak ada tambahan saksi yang akan dihadirkan di persidangan. Untuk itu, Edward yang tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan bagi saksi ahli di persidangan memang seharusnya tetap bisa dihadirkan oleh kuasa hukum sebagai saksi ahli pidana yang meringankan.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, Edward Omar Haritjh sebenarnya sejak awal diperiksa di kepolisian untuk diminta keterangan sebagai ahli. Namun, dalam beberapa proses tahapannya itu, saksi ahli memberikan jawaban yang ragu-ragu. Pernyataan ahli yang ragu itu dilihat dari, saksi ahli yang tidak memberikan penjelasan yang lebih rigit dan lebih jelas terkait dengan apa yang diduga tersebut

telah masuk dalam kategori tindak pidana atau tidak. Hal inilah yang membuat Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan Edward sebagai saksi, pernyataan ini disampaikan oleh Koordinator Tim Persidangan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), Nasrulloh Nasution kepada Republika seusai persidangan digelar. Melalui pemberitaan ini Republika menggambarkan bahwa yang menjadi alasan saksi ahli Edward tidak dihadirkan dan di tolak kesaksiannya karena saksi ahli memiliki keraguan tentang kasus, serta penjelasan terkait kasus yang kurang mendalam. Selain itu saksi Edward dianggap kurang etis untuk dihadirkan karena telah mengetahui berkas acra pemeriksaan (BAP) dari JPU.

Tabel 3.3.16. Analisis *Make Moral Judgement* Pemberitaan 16

Media Massa	Make Moral Judgement
Tempo	Pemikiran Cak Nur sangat menekankan aspek-aspek nilai bahwa dalam agama hal yang diutamakan adalah akhlak dan perilaku. Setiap pemimpin harus bisa memberikan keadilan bagi semua orang, hal ini dinilai sudah tercermin pada diri Ahok
Republika	Secara simbolik buku yang diberikan kepada Ahok menjelaskan seluruh pikiran Cak Nur. Dengan hal tersebut juga menitipkan nilai-nilai yang selama ini diperjuangkan Cak Nur pada Ahok kalau terpilih menjadi Gubernur

Pada analisis pemberitaan ini, dari hasil diatas *make moral judgement* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, pemikiran Cak Nur sangat menekankan aspek-aspek nilai bahwa dalam agama hal yang diutamakan adalah akhlak dan perilaku. Setiap pemimpin harus bisa memberikan keadilan bagi semua orang, hal ini dinilai sudah tercermin pada diri Ahok. Cak Nur selalu memperjuangkan nilai bahwa negara ini bukan negara agama tapi negara bangsa. Negara bangsa yang melayani dan memberikan perlindungan pada seluruh warganya tanpa diskriminatif, tanpa pilih kasih dan sebagainya. Pemikiran tersebut sedikit-banyaknya sudah ada pada diri Ahok, pernyataan tersebut disampaikan oleh pengamat politik sekaligus sahabat Cak Nur, Yudhi Latif saat ditemui Tempo. Melalui pemberitaan tersebut Tempo memberi gambaran bahwa

mau siapapun yang menjadi pemimpin, maka nilai-nilai luhur yang telah diperjuangkan sebelumnya mampu untuk terus dilanjutkan bahkan dikembangkan bagi kebaikan masyarakat luas. Seperti yang diperjuangkan Cak Nur, Indonesia sebagai sebuah bangsa yang merdeka sudah seharusnya memberikan keadilan dan kebaikan kepada masyarakat. Sikap-sikap diskriminatif, pilih kasih dan sebagainya sudah semestinya dihilangkan untuk membangun sebuah bangsa merdeka yang benar-benar diciptakan untuk kebaikan seluruh warganya.

Selanjutnya dari sisi *Republika* ialah, secara simbolik buku yang diberikan kepada Ahok menjelaskan seluruh pikiran Cak Nur. Dengan hal tersebut juga menitikpkan nilai-nilai yang selama ini diperjuangkan Cak Nur pada Ahok kalau terpilih menjadi Gubernur. Cak Nur selalu memperjuangkan nilai bahwa Indonesia bukanlah negara agama, tetapi negara yang menjunjung kebangsaan yang selalu mengutamakan kebaikan warganya. Pernyataan ini disampaikan oleh penulis *Ensiklopedia Nurcholish Madjid*, Budhy saat diwawancarai *Republika*. Melalui pemberitaan ini *Republika* menggambarkan Indonesia negara bangsa yang melayani memberikan perlindungan pada seluruh warganya tanpa diskriminatif, tanpa pilih kasih dan sebagainya. Untuk itu jika nanti Ahok terpilih sebagai Gubernur kembali, maka sudah seharusnya untuk turut serta melanjutkan pemikiran yang baik tersebut.

Tabel 3.3.17. Analisis *Make Moral Judgement* Pemberitaan 17

Media Massa	Make Moral Judgement
Tempo	Integrasi Transjakarta dengan angkutan umum KWK sudah diatur dalam undang-undang lalu lintas. Selain itu, aturan itu sendiri keluar jauh hari sebelum pilkada DKI 2017
Republika	Yang terpenting, masyarakat memperoleh manfaatnya. Tapi, masyarakat luas akan mengingat pelaksanaan integrasi bus transjakarta terjadi setelah ide tentang itu disampaikan

Pada analisis pemberitaan ini, dari hasil diatas *make moral judgement* pemberitaan tersebut menurut *Tempo* adalah, integrasi Transjakarta dengan

angkutan umum KWK sudah diatur dalam undang-undang lalu lintas. Selain itu, aturan itu sendiri keluar jauh hari sebelum pilkada DKI 2017. Pada saat Anies Baswedan belum mencalonkan diri maju sebagai calon gubernur, Undang-undang tentang integrasi angkutan umum tersebut sudah dikeluarkan. Jadi siapa yang mencontek siapa, pernyataan tersebut disampaikan oleh Ahok untuk menanggapi pernyataan lawan politiknya, Anies Baswedan, yang menganggap kerjasama PT Transjakarta dan angkutan Koperasi Wahana Kalpika, meniru program Ok Otrip. Melalui pemberitaan tersebut Tempo memberikan gambaran bahwa program-program yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat maka akan lebih baik jika lebih cepat dilaksanakan. Program yang telah diatur oleh undang-undang dan sedang dijalankan seharusnya tidak lagi dijadikan sebagai bahan untuk kampanye baik oleh siapapun itu. Karena program tersebut sudah dijalankan yang tujuannya sama-sama untuk kebaikan masyarakat. Jadi menjadi kurang baik jika program yang sudah diatur dalam undang-undang kembali digunakan dalam kampanye untuk menarik simpati masyarakat.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, warga DKI pasti bisa menilai siapa pihak yang punya ide dan siapa yang meniru. Yang terpenting, masyarakat memperoleh manfaatnya. Tapi, masyarakat luas akan mengingat pelaksanaan integrasi bus transjakarta terjadi setelah ide tentang itu disampaikan. Pelaksanaan ide yang saat ini sedang berjalan secara tak langsung merupakan wujud pengakuan bahwa ide tersebut bagus. Pernyataan ini disampaikan oleh calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat diwawancarai Republika terkait programnya. Melalui pemberitaan ini Republika menggambarkan bahwa sebuah program yang bagus pasti akan segera dilaksanakan yang bertujuan untuk kebaikan masyarakat. Terlepas dari siapa yang melaksanakan program tersebut, tetapi masyarakat yang merasakan manfaat dari program yang berjalan tersebut yang menjadi tujuannya. Karena program dibuat dan di janjikan dalam kampanye tidak lain ditujukan untuk kebaikan masyarakat dalam berkehidupan. Maka masyarakat tentunya mampu menilai apakah program tersebut bermanfaat bagi mereka dan mampu memilih mana program yang terbaik bagi mereka.

Tabel 3.3.18. Analisis *Make Moral Judgement* Pemberitaan 18

Media Massa	Make Moral Judgement
Tempo	Wanita yang kedapatan membawa senjata tajam, mengaku kalau sudah menjadi kebiasaan sehari-hari membawa sangkur seperti itu
Republika	Wanita relawan Ahok yang membawa sangkur di dalam tas, mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kebiasaannya. Tidak ada unsur kesengajaan

Pada analisis pemberitaan ini, dari hasil diatas *make moral judgement* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, wanita yang kedapatan membawa senjata tajam, mengaku kalau sudah menjadi kebiasaan sehari-hari membawa sangkur seperti itu. Wanita yang diduga merupakan relawan pendukung Ahok tersebut, hendak menyaksikan persidangan ke-16 kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Ahok. Namun, karena kedapatan membawa senjata tajam, wanita tersebut langsung dibawa ke kantor Polres Jakarta Selatan. Setelah diamankan, polisi akan mendalami alasan wanita itu membawa sangkur ke ruang persidangan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan Ajun Komisaris Besar Dony Alexander, di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Melalui pemberitaan tersebut Tempo meberi gambaran bahwa untuk alasan apapun, membawa senjata tajam di area publik tidak diperkenankan untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan untuk menghindari penyalahgunaan senjata tajam yang bisa saja menimbulkan korban. Untuk itu sebaiknya tidak menyimpan dan membawa benda-benda yang membahayakan ke area publik, apalagi ke ruang persidangan yang sudah jelas harus terjamin keamanannya. Maka sebaiknya kebiasaan-kebiasaan untuk membawa benda-benda yang bisa berbahaya mampu dihindari untuk setiap masyarakat.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, wanita relawan Ahok yang membawa sangkur di dalam tas, mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kebiasaannya. Tidak ada unsur kesengajaan hanya saja sudah menjadi kebiasaan

wanita tersebut membawa sangkur seperti itu. Wanita yang kedapatan membawa senjata tajam tersebut dilarang masuk ke dalam ruang sidang, dan langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengapa dia membawa sangkur. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kabag Ops Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Dony Alexander di Gedung Auditorium Kementan, Jakarta Selatan. Melalui pemberitaan tersebut *Republika* menggambarkan bahwa penyalahgunaan senjata tajam masih sering terjadi di masyarakat. Untuk itu masyarakat dan aparat kepolisian harus bekerja sama untuk menanggulangi hal tersebut. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka sebaiknya masyarakat juga tidak membawa senjata tajam kemana-mana. Bahkan harus bisa menghindari kebiasaan membawa-bawa senjata tajam di dalam tas, saku, dan sebagainya. Sikap kepolisian memang sepatutnya untuk cepat melakukan respon demi keamanan, apalagi di ruang persidangan.

Tabel 3.3.19. Analisis *Make Moral Judgement* Pemberitaan 19

Media Massa	Make Moral Judgement
Tempo	Orang yang suka dengan programnya tetapi kurang merespons, pasti berhubungan dengan keyakinannya. Ibu tersebut ingin mengikuti program budidaya perikanan, namun tidak enak jika saat pemilihan kepala daerah DKI selanjutnya malah tidak memilih Ahok
Republika	Surat Al Maidah tidak pernah menyebutkan tidak boleh memilih pemimpin non-Muslim. Tapi Rizieq selalu mengatakan hal tersebut sehingga membuat gubernur tandingan Muslim

Pada analisis pemberitaan ini, dari hasil diatas *make moral judgement* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, orang yang suka dengan programnya tetapi kurang merespons, pasti berhubungan dengan keyakinannya. Ibu tersebut ingin mengikuti program budidaya perikanan, namun tidak enak jika saat pemilihan kepala daerah DKI selanjutnya malah tidak memilih Ahok. Karena kondisi tersebut, Ahok pun teringat Surat Al-Maidah ayat 51. Isi dari pidato yang dilakukan Ahok merupakan kata-kata yang terlintas di pikirannya.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ahok di dalam persidangan lanjutan kasus dugaan penistaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Auditorium Kementerian Pertanian. Melalui pemberitaan ini Tempo memberi gambaran bahwa sepantasnya dalam bertindak tidak hanya mengandalkan apa yang diyakini saja. Tidak seharusnya menilai apa yang dipikirkan orang lain hanya dari keyakinan diri sendiri, melainkan akan lebih baik jika memastikan apa yang sebenarnya orang lain pikirkan. Hal ini tentu saja bertujuan untuk lebih yakin terkait alasan dan pikiran orang lain tidak tertarik dengan pembicaraan. Jika bertindak hanya dari pemikiran dan anggapan sendiri saja, maka tidak menutup kemungkinan akan menghasilkan hasil yang buruk dan diluar perencanaan. Seperti dalam kasus yang menyerak Ahok, dari hanya keyakinana diri sendiri terhadap apa yang dipikirkan ibu-ibu saat mendengarkan pidatonya mampu membuatnya menjadi terdakwa kasus dugaan penistaan agama.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, surat Al Maidah tidak pernah menyebutkan tidak boleh memilih pemimpin non-Muslim. Tapi Rizieq selalu mengatakan hal tersebut sehingga membuat gubernur tandingan Muslim. Rizieq dan kawan-kawan kerap melakukan demonstrasi menentang kepemimpinan Ahok setiap hari Jumat. Untuk meyakinkan alasan ibu tersebut yang tidak antusias Ahok berpidato dengan membahas surat Al Maidah. Ahok menjelaskan, bahwa dia terbiasa berbicara apa yang terlintas di benaknya. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ahok, di dalam persidangan kasus dugaan penodaan agama yang digelar di PN Auditorium Kementan, Jakarta Utara. Melalui pemberitaan tersebut Republika menggambarkan bahwa meskipun banyak peristiwa yang terjadi tidak seharusnya mengasumsikan apa yang dipikirkan orang lain begitu saja. Lebih bijaksana jika menanyakan langsung apa yang dipikirkan orang lain, tanpa harus mengira-ngira yang cenderung bisa terjadi kesalahan penafsiran. Untuk kasus tersebut Ahok seharusnya tidak mengira-ngira apa yang membuat ibu-ibu tidak antusias, namun lebih bijaksana untuk menanyakan kepada ibu-ibu tersebut.

Tabel 3.3.20. Analisis *Make Moral Judgement* Pemberitaan 20

Media Massa	Make Moral Judgement
Tempo	Sempat memiliki niatan untuk hengkang dari Indonesia setelah pabrik yang dimilikinya ditutup oleh pejabat setempat
Republika	Tidak didampingi istrinya Veronica Tan, kepulangan Ahok kampung halamnya dalam rangka ziarah ke makam Ayahanda Indra Tjahaja Purnama

Pada analisis pemberitaan ini, dari hasil diatas *make moral judgement* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, Ahok mengingat pesan ayahnya yang meminta untuk tetap di Indonesia. Ahok sempat memiliki niatan untuk hengkang dari Indonesia setelah pabrik yang dimilikinya ditutup oleh pejabat setempat. Menurut Ahok, ayahnya yang mengajarkan anak-anaknya bahwa orang satu bangsa dan satu Tanah Air itu bersaudara. Untuk itu Ahok tetap menjaga pesan yang diberikan ayahnya untuk mengabdikan sebagai pejabat. Menjadi pejabatlah yang bisa menegakkan keadilan yang mengayomi masyarakat. pernyataan tersebut disampaikan oleh Ahok saat ditemui Tempo. Melalui pemberitaan tersebut Tempo memberi gambaran bahwa, dalam kondisi seperti apapun masyarakat satu tanah air memanglah seperti sebuah saudara. Saudara yang saling mendukung dan menjaga demi terciptanya kedamaian yang lebih baik bagi masyarakat. Memang Indonesia menjadi tempat yang keras bagi putra-putri tanah air untuk tetap memajukan negerinya sendiri, karena kurangnya penghargaan terhadap pencapaian-pencapaian putra-putri tanah air. Namun hal itu bukanlah sebuah alasan bagi putra-putri tanah air untuk meninggalkan negerinya sendiri dan hidup di luar negeri, justru hal tersebut yang menjadi alat untuk *memecut* semangat untuk memajukan negeri sendiri sehingga mampu bersaing seperti negeri maju lainnya.

Selanjutnya dari sisi Republika ialah, Ahok tidak didampingi istrinya Veronica Tan, saat pulang ke kampung halamnya dalam rangka ziarah ke makam Ayahanda Indra Tjahaja Purnama. Karena saat itu, Veronica justru menjenguk warga di jalan Puyuh RT 002 RW 02 No 278, Manggarai, Jakarta Selatan. Setelah

sehari sebelumnya pada Rabu sore Ahok melakukan blusukan ke wilayah Gandaria Selatan, Kebayoran, Jakarta Selatan. Ahok mengecek aliran kali Grogol dan menjenguk warga yang sakit di daerah tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekertaris tim pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, Ace Hasan Syadzily. Melalui pemberitaan tersebut Republika menggambarkan bahwa menjadi pemimpin bukanlah hal yang mudah. Karena pemimpin juga harus bisa membagi waktu untuk melayani warganya, melayani keluarganya, serta melayani dirinya sendiri. Untuk itu menjadi seorang pemimpin harus mampu membedakan ruang-ruang tersebut, sehingga peranya mampu sesuai dengan keadaanya.

3.4. Analisis *Treatment Recommendation*

Tabel 3.4.1. Analisis *Treatment Recommendation* Pemberitaan 1

Media Massa	Treatment Recommendation
Tempo	Pembebasan lahan dapat diselesaikan pada April, program normalisasi meliputi pemancangan turap, parapet, jalan ispeksi, dan dinding penahan tanah rampung sekitar Oktober 2017. Program ini direncanakan mampu membebaskan daerah sekitara sungai dari ancaman banjir
Republika	Warga yang tinggal di daerah sekitaran sungai Ciliwung bersedia untuk pindah asal diberikan ganti rugi. Meskipun warga hanya berbekal bukti Pajak Bumi Bangunan (PBB) saja, tanpa memiliki sertifikat atas tanah sekitaran sungai yang ditinggali

Pada analisis pemberitaan yang pertama, dari hasil diatas *treatment recommendation* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, menurut Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Iskandar, menjelaskan lima aliran air di sepanjang Komplek Garuda mengakibatkan banjir di wilayah SMA 8, Bukit Duri. Pemerintah memerlukan lahan sepanjang bantaran sungai untuk program pembangunan papan turap. Untuk itu pembebasan lahan seharusnya

dapat diselesaikan pada April, dan program normalisasi meliputi pemancangan turap, parapet, jalan inspeksi, dan dinding penahan tanah rampung sekitar Oktober 2017. Program ini direncanakan mampu membebaskan daerah sekitara sungai dari ancaman banjir. Dari berita diatas Tempo membahas tentang program normalisasi sungai Ciliwung yang bertujuan untuk mencegah banjir akibat luapan sungai Ciliwung terjadi kembali. Tujuan dari pelaksanaan program ini tidak lain adalah untuk kepentingan masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dari permasalahan banjir yang selalu terjadi. Tempo berusaha menunjukkan sisi positif dari program normalisasi daerah sekitaran sungai, dengan mengedepankan alasan untuk menjamin banjir yang sekian tahun terus terjadi, bisa dihidarkan dan tidak terjadi kembali.

Selanjutnya dari sisi Republika memberikan *treatment recomendation* ialah, memberikan pendapat yang bersumber dari keterangan warga yang tinggal di sekitaran sungai Ciliwung yaitu Rantiyah, Ida, dan Pujiah. Dari pernuturan warga, dapat disimpulkan bahwa warga yang tinggal di daerah sekitaran sungai Ciliwung bersedia untuk pindah asal diberikan ganti rugi yang layak. Meskipun warga hanya berbekal bukti Pajak Bumi Bangunan (PBB) saja, tanpa memiliki sertifikat atas tanah sekitaran sungai yang ditinggali. Warga yang telah tinggal di pengungsian mengaku bahwa tidak memiliki sertifikat karena merupakan tanah sungai. Namun tentu saja mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi yang layak dari Pemerintah Provinsi untuk pelaksanaan program tersebut, karena mereka juga merupakan warga DKI Jakarta. Dari pemberitaan tersebut Republika menunjukkan sisi yang berpihak pada masyarakat. Bahwa masyarakat juga menjadi elemen yang harus dipikirkan untuk terlaksananya program tersebut, karena program tersebut tidak lain ditujukan untuk mereka. Untuk itu program akan berjalan dengan baik jika, Pemerintah Provinsi mampu merangkul masyarakat untuk saling menjalankan kewajibannya dalam program tersebut.

Tabel 3.4.2. Analisis *Treatment Recommendation* Pemberitaan 2

Media Massa	Treatment Recommendation
Tempo	Mahkamah Agung potensial tidak akan mengeluarkan fatwa untuk menonaktifkan Ahok. Karena Ketua MA Hatta Ali meminta perkara Ahok diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri sendiri
Republika	Kebisingan politik juga terjadi karena banyaknya <i>buzzer</i> atau penyebar informasi dan kabar palsu dengan kepentingan politik tertentu. Untuk itu PP Muhammadiyah didorong untuk mengeluarkan fatwa haram penyebar kabar palsu

Pada analisis pemberitaan yang kedua, dari hasil diatas *treatment recommendation* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo berpendapat bahwa Mahkamah Agung potensial tidak akan mengeluarkan fatwa untuk menonaktifkan Ahok. Karena Ketua MA Hatta Ali meminta perkara Ahok diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri sendiri. Dengan hal ini bisa dianggap bahwa hanya keputusan PTUN atas gugatan yang telah dilayangkanlah yang menjadi satu-satunya jalan bagi pemerintah untuk turut campur tangan dalam perkara Ahok. Dari pemberitaan tersebut Tempo membahas mengenai bagaimana permintaan untuk Presiden Joko Widodo untuk campur tangan dalam kasus Ahok, serta bagaimana cara terbaik yang ditempuh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tempo menilai bahwa menunggu keputusan hukum yang dikeluarkan oleh PTUN adalah jalan terbaik dalam menangani kasus yang menyangkut Ahok. Karena sekarang yang beredar di masyarakat masih banyak argumentasi-argumentasi dan informasi-informasi yang masih *simpang siur* belaka. Untuk itu agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta menjamin keadilan bagi semua masyarakat, maka biarkanlah lembaga hukum terkait yang menangani dan memutuskan hasil dari perkara tersebut.

Selanjutnya dari sisi Republika memberikan *treatment recommendation* ialah, menurut Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Ansar

Simanjuntak. Kebisingan politik juga terjadi karena banyaknya *buzzer* atau penyebar informasi dan kabar palsu dengan kepentingan politik tertentu. Karena pihak-pihak tertentu ini menjadi produsen fitnah, menebar kebencian, serta menebar instabilitas. Untuk itu PP Muhammadiyah didorong untuk mengeluarkan fatwa haram untuk penyebar kabar palsu. Dari pemberitaan tersebut Republika membahas bagaimana keinginan yang diwakili oleh salah satu ormas Islam, yaitu PP Muhammadiyah. Serta mengenai bagaimana sikap PP Muhammadiyah akan menanggapi persoalan yang cukup beresiko karena menyangkut isu keagamaan tersebut. Republika memberikan gambaran dari sisi Islami dalam menanggapi permasalahan tersebut, bahkan menilai bahwa penyebar berita palsu adalah sebuah kejahatan besar yang seharusnya diantisipasi secepatnya. Karena melalui berita serta informasi palsu dapat menciptakan kesalahpahaman dalam masyarakat yang berakhir pada timbulnya perpecahan. Untuk itu maka, Republika menilai hal-hal seperti penyebar berita palsu, penyebar kebencian, dan fitnah sebagai sebuah tindakan yang tidak benar untuk dilakukan, bahkan dengan alasan apapun.

Tabel 3.4.3. Analisis *Treatment Recommendation* Pemberitaan 3

Media Massa	Treatment Recommendation
Tempo	Karena ada kata “dibohongi” dalam ucapan Ahok di Kepulauan Seribu membuat perkataannya berarti salah. Sebab, kata “bohong” yang ditempelkan pada surat atau Al-Quran sudah bermakna negatif
Republika	Hakim tidak pernah terikat pada keterangan ahli sama sekali. Keterangan yang diberikan saksi MUI tidak akan memberatkan Ahok. Sehingga tidak ada pengaruhnya bila tidak menanyakan keterangan kepada saksi ahli

Pada analisis pemberitaan yang ketiga, dari hasil di atas *treatment recommendation* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, menurut Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Miftachul Akhyar karena ada kata “dibohongi” dalam ucapan Ahok di Kepulauan Seribu, membuat perkataannya

berarti salah. Sebab, kata “bohong” yang ditempelkan pada surat atau Al-Quran sudah bermakna negatif. Tindakan Ahok tersebut sudah keliru, dengan menempelkan lafal “bohong” pada Al-Maidah. Kemudian dari pidato Ahok yang menggunakan kata “bohong” tersebut telah dianggap menistakan agama Islam. Dalam pemberitaan tersebut Tempo membahas seperti apa keterangan yang diberikan saksi ahli dalam menanggapi pertanyaan dari tim kuasa hukum Ahok. Serta bagaimana kronologi pidato Ahok yang membuatnya dilaporkan atas dugaan penistaan agama. Dari sudut pandang Tempo menilai bahwa tindakan Ahok untuk berpidato seperti itu ialah salah, namun Tempo juga tidak membenarkan penetapan Ahok sebagai penista agama tanpa menelisik terlebih dahulu kronologi dari peristiwa tersebut. Karena apa kronologi di tempat kejadian tersebut menjadi penting karena belum ada ikut campur tangan, pemotongan, maupun edit seperti pada video pidato Ahok yang dianggap menistakan agama Islam. Selanjutnya Tempo menilai bahwa lebih bijaksana jika menilai suatu peristiwa, melalui proses penelusuran serta pembuktian yang lebih lengkap.

Selanjutnya dari sisi Republika memberikan *treatment recommendation* ialah, menurut tim penasihat hukum Ahok, I Wayan Sudirta, hakim tidak pernah terikat pada keterangan ahli sama sekali. Keterangan yang diberikan saksi MUI tidak akan memberatkan Ahok. Sehingga tidak ada pengaruhnya bila tidak menanyakan keterangan kepada saksi ahli. Tim penasihat hukum Ahok mempunyai keyakinan bahwa keterangan ahli sangat meyakinkan, dan tidak akan memberatkan, itu sebabnya tim penasihat hukum Ahok tidak mengajukan pertanyaan. Melalui pemberitaan tersebut Republika membahas mengenai sikap tim penasihat Ahok yang memilih untuk tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli yang di datangkan oleh JPU. Dengan kapasitasnya sebagai ahli di bidang masing-masing saksi yang didatangkan oleh JPU tentu saja memberikan keterangan sesuai dengan kemampuannya, dengan saksi yang juga merupakan anggota MUI tentu memiliki kredibilitas yang meyakinkan. Hal ini dapat dilihat dari pihak penasihat hukum yang menyatakan bahwa keterangan ahli sangat

meyakinkan dan tidak mengajukan pertanyaan untuk menanggapi keterangan tersebut.

Tabel 3.4.4. Analisis *Treatment Recommendation* Pemberitaan 4

Media Massa	Treatment Recommendation
Tempo	Penanganan banjir di DKI Jakarta sudah mencapai 40 persen. Dan genangan di beberapa wilayah pun sudah surut. Namun adanya beberapa tanggul yang jebol, dan sisa 60 persen akan dilakukan normalisasi, termasuk pembuatan waduk
Republika	Seperti yang diketahui normalisasi baru 40 persen. Masih ada 60 persen lagi. Banjir di Jakarta bisa surut dalam waktu hitungan jam. Meskipun terdapat beberapa tanggul yang jebol. Tetapi surut dalam waktu yang cepat

Pada analisis pemberitaan yang keempat, dari hasil diatas *treatment recommendation* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, menurut Basuki Tjahaja Purnama penanganan banjir di DKI Jakarta sudah mencapai 40 persen. Dan genangan di beberapa wilayah di DKI Jakarta sudah surut. Namun adanya beberapa tanggul yang jebol, dan sisa 60 persen akan dilakukan normalisasi, termasuk pembuatan waduk. Dalam pemberitaan tersebut Tempo membahas kondisi serta penanganan banjir yang terjadi di DKI Jakarta. Setiap tahun Jakarta pasti tergenang banjir, baik itu banjir dari luapan sungai maupun banjir akibat intensitas hujan yang tinggi. Banyak program yang dilakukan pemerintah untuk menangani banjir tersebut, namun tak jarang program hanya sebatas wacana program belaka. Banyak program yang terbukti kurang signifikan mengurangi banjir yang terjadi di Jakarta. Tetapi belakangan ini, meskipun banjir masih terjadi tetapi skala banjir yang terjadi jauh lebih kecil dibandingkan banjir yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Hal ini dikarenakan makin digencarkannya program normalisasi aliran sungai yang bertujuan mengembalikan sungai seperti fungsinya. Dengan padatnya pemukiman sekitar sungai serta pendangkalan sungai, maka ketika hujan turun cukup lebat sungai-sungai tersebut akan meluap dan membanjiri pemukiman warga. Oleh sebab itu,

program normalisasi sungai yang sudah berjalan dan membuktikan mampu mengurangi skala banjir ini, sangat bermanfaat untuk membebaskan Jakarta dari ancaman banjir.

Selanjutnya dari sisi Republika memberikan *treatment recomendation* ialah, Basuki Tjahaja Purnama menuturkan bahwa seperti yang diketahui normalisasi baru 40 persen. Masih ada 60 persen lagi. Banjir di Jakarta bisa surut dalam waktu hitungan jam. Meskipun terdapat beberapa tanggul yang jebol. Tetapi surut dalam waktu yang cepat. Banjir di Jakarta yang disebabkan oleh beberapa tanggul yang jebol ini diklaim mampu surut dengan sendirinya dalam waktu yang singkat. Hal ini dikarenakan penataan drainase yang sudah lebih baik dan mampu menyerap banjir lebih cepat. Melalui pemberitaan tersebut Republika membahas mengenai program normalisasi sungai yang mampu menurunkan skala banjir bahkan bisa mampu membuat Jakarta terbebas dari banjir. Program yang hampir dilakukan setengah jalan ini, dikatakan mampu memberikan efek yang signifikan dalam mengurangi banjir di Jakarta. Dengan terselesainya program ini maka, masyarakat yang akan menikmati manfaatnya. Tertata rapi serta hilangnya banjir dari Jakarta tentu saja akan sangat berimbas pada perkembangan masyarakat yang tinggal di Jakarta. Aktivitas akan berjalan dengan baik dan optimal tanpa takut lagi akan ancaman banjir yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Tabel 3.4.5. Analisis *Treatment Recomendation* Pemberitaan 5

Media Massa	Treatment Recomendation
Tempo	Dikenakan dakwaan alternatif yakni Pasal 156a dengan ancaman 5 tahun penjara dan Pasal 156 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara
Republika	Dikenakan dakwaan alternatif yakni Pasal 156a dengan ancaman 5 tahun penjara dan Pasal 156 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara

Pada analisis pemberitaan yang kelima, dari hasil diatas *treatment recomendation* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, berdasarkan hasil dari tuntutan JPU, Basuki Tjahaja Purnama dikenakan dakwaan alternatif yakni

Pasal 156a dengan ancaman 5 tahun penjara dan Pasal 156 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Pasal 156 KUHP, tentang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan. Sementara Pasal 156a KUHP, tentang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Melalui pemberitaan tersebut Tempo membahas mengenai peraturan yang didakwakan kepada Ahok atas pidatonya yang dilakukan di Kepulauan Seribu. Tempo menilai bahwa ketika menjadi figur publik maka sudah selayaknya untuk mampu berpikir jauh dan mempertimbangkan konsekuensi dari apa yang dilakukan. Untuk itulah dengan Indonesia sebagai negara hukum, maka hampir segala sesuatunya memiliki peraturan hukum yang sepantasnya dipatuhi. Baik itu pejabat, pegawai pemerintahan, maupun rakyat biasa jika terbukti melakukan pelanggaran maka bijaksana jika diproses dengan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya dari sisi Republika memberikan *treatment recommendation* ialah, Ahok dikenakan dakwaan alternatif yakni Pasal 156a dengan ancaman 5 tahun penjara dan Pasal 156 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Pasal 156 KUHP, tentang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan. Sementara Pasal 156a KUHP, tentang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Melalui pemberitaan tersebut Republika membahas mengenai peraturan yang didakwakan dilanggar oleh Ahok dalam berpidato ddalam rangka kunjungan kerjanya di Kepulauan Seribu. Dengan dakwaan diatas, maka Ahok dihadapkan dengan sanksi yang cukup serius dari perkataanya dalam berpidato tersebut. Sebagai negara hukum, sudah selayaknya Indonesia menjalankan hukum secara adil dan tidak memihak. Untuk itulah bagi siapa saja yang terbukti melanggar hukum, maka senantiasa

harus mampu mempertanggung jawabkan tindakannya melalui proses persidangan.

Tabel 3.4.6. Analisis *Treatment Recommendation* Pemberitaan 6

Media Massa	Treatment Recommendation
Tempo	Tentang pengajuan cuti kembali terkait dengan peraturan yang mengharuskan calon inkumben untuk cuti selama kampanye, Ahok menegaskan tidak tahu kapan akan mengambil cuti kembali. Ahok memilih untuk tidak memikirkan perihal cuti kampanye, dan lebih fokus memikirkan kerja sebagai Gubernur
Republika	Lebih memilih kerja karena banyaknya disposisi di meja kerja gubernur. Karena itu, Ahok mengaku pusing jika tiba-tiba diajak rapat oleh Tim Suksesnya. Namun jika disuruh memilih, Ahok lebih memilih kerja saja

Pada analisis pemberitaan yang keenam, dari hasil di atas *treatment recommendation* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, menurut Ahok tentang pengajuan cuti kembali terkait dengan peraturan yang mengharuskan calon inkumben untuk cuti selama kampanye, Ahok menegaskan tidak tahu kapan akan mengambil cuti kembali. Ahok memilih untuk tidak memikirkan perihal cuti kampanye, dan lebih fokus memikirkan kerja sebagai Gubernur. Kerja secara nyata justru dapat menjadi pembuktian kerjanya sebagai gubernur. Dalam pemberitaan tersebut Tempo membahas mengenai pilihan Ahok untuk lebih memilih fokus bekerja daripada memilih mengambil cuti kampanye. Karena melalui hasil nyata kerja membangun Jakarta maka masyarakat tentunya dapat melihat secara nyata hasil dari masa kepemimpinannya. Dengan terwujudnya serta dihasilkannya kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat, maka masyarakatlah yang akan menentukan sendiri pangannya terhadap calon gubernurnya. Masyarakat yang merasakan hasilnya, dan masyarakat juga yang akan memilih mana yang akan dijadikan pemimpin yang bisa mengayomi masyarakat.

Selanjutnya dari sisi Republika memberikan *treatment recommendation* ialah, Ahok menuturkan lebih memilih kerja karena banyaknya disposisi di meja kerja gubernur. Karena itu, Ahok mengaku pusing jika tiba-tiba diajak rapat oleh Tim Suksesnya. Namun jika disuruh memilih, Ahok lebih memilih kerja saja. Sikap yang bekerja keras juga harus diimbangi dengan target pencapaian, agar hasil dari kerja keras tidak melenceng dan disalah gunakan. Melalui pemberitaan ini Republika membahas mengenai Ahok yang memilih fokus melanjutkan kerja, serta memaksimalkan waktunya sebagai gubernur Jakarta. Karena ketika memasuki waktu kampanye, maka urusan kerja sebagai gubernur akan diserahkan pada PLT, Ahok memaksimalkan mengejar program-programnya yang masih berjalan. Untuk itu sudah seharusnya sebagai seorang gubernur untuk bekerja mengabdikan kepada masyarakat, karena gubernur dipilih oleh masyarakat. Baik itu masyarakat yang pro maupun kontra terhadap kebijakan, tugas gubernur ialah menganggap mereka sama sebagai masyarakat yang ditargetkan sebagai tujuan kerja seorang gubernur.

Tabel 3.4.7. Analisis *Treatment Recommendation* Pemberitaan 7

Media Massa	Treatment Recommendation
Tempo	Belum ada informasi dari Kementerian Luar Negeri dan protokol Presiden terkait penyambutan Raja Salman. Untuk itu akan dilakukan pengecekan terlebih dulu persiapan pemerintah DKI dalam menyambut kedatangan Raja Salman
Republika	Yang menyambut Presiden Joko Widodo. Ahok-Djarot akan ikut mendampingi kalau mendapat undangan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap kunjungannya Raja Salman dapat meningkatkan kerja sama Indonesia dengan Arab Saudi. Raja Arab Saudi melakukan Investasi di Indonesia serta penambahan kuota haji Indonesia

Pada analisis pemberitaan yang ketujuh, dari hasil di atas *treatment recommendation* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, menurut Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri DKI Jakarta, Muhammad Mawardi belum ada informasi dari Kementerian Luar Negeri dan protokol

Presiden terkait penyambutan Raja Salman. Untuk itu akan dilakukan pengecekan terlebih dulu persiapan pemerintah DKI dalam menyambut kedatangan Raja Salman. Dengan belum adanya informasi terkait prosedur penyambutan, maka belum bisa dipastikan apakah Ahok akan ikut serta dalam penyambutan Raja Salman. Melalui pemberitaan tersebut Tempo membahas mengenai kunjungan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud ke Indonesia. Kunjungan Raja Salman menarik perhatian banyak pihak, termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Namun belum bisa dipastikan apakah Ahok akan turut hadir dalam penyambutan raja Salaman yang disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu, dari kunjungan Raja Salman ke Indonesia Ahok berharap kuota haji Indonesia bisa ditambah. Meskipun berbeda kepentingan namun, hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat banyak bisa menjadi tujuan yang bagus untuk dicapai.

Selanjutnya dari sisi Republika memberikan *treatment recommendation* ialah, menurut Gubernur Pejawat DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat belum tahu apakah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan turut ikut dalam penyambutan Raja Salman. Karena yang dipastikan menyambut adalah Presiden Joko Widodo. Ahok-Djarot akan ikut mendampingi jika terdapat undangan untuk ikut menyambut. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap kunjungagn Raja Salman dapat meningkatkan kerja sama Indonesia dengan Arab Saudi. Raja Arab Saudi melakukan Investasi di Indonesia serta penambahan kuota haji Indonesia. Dalam pemberitaan tersebut Republika membahas mengenai harapan Ahok dan Djarot pada kunjungan Raja Salman ke Indonesia. Setidaknya tiga harapan yang diharapkan dapat tercapai dari kunjungan kenegaraan Raja Salman. Kunjungan Raja Salman ke Indonesia mendapat antusiasme yang cukup tinggi dari masyarakat, karena Raja Salman menjadi simbol perwakilan negara Islam Timur Tengah yang mengunjungi Indonesia dengan mayoritas penduduk Islam.

Tabel 3.4.8. Analisis *Treatment Recommendation* Pemberitaan 8

Media Massa	Treatment Recommendation
Tempo	Tahun lalu, tiga orang menjadi korban dari robohnya reklame yang dipasang di jembatan penyeberangan orang di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang disebabkan oleh angin kencang
Republika	Sebuah baliho berukuran besar roboh dan menimpa taksi di Jalan S Parman, Slipi, Jakarta Barat, tepatnya di depan RS Harapan Kita. Akibat dari kejadian tersebut lalu lintas di daerah tersebut tidak bisa dilintasi untuk beberapa saat

Pada analisis pemberitaan yang kedelapan, dari hasil diatas *treatment recommendation* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, dari penelusuran Tempo, tahun lalu tiga orang menjadi korban dari robohnya reklame yang dipasang di jembatan penyeberangan orang di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang disebabkan oleh angin kencang. Jatuhnya baliho tersebut disertai dengan ambruknya *railing* dan atap jembatan. Kejadian ini serupa dengan yang terjadi di RS Harapan Kita, Jakarta Barat. Meskipun kali ini tidak memakan korban, namun kejadian reklame yang roboh tetap saja membahayakan bagi masyarakat sekitar dan pengguna jalan. Dalam pemberitaan tersebut Tempo membahas mengenai bahaya dari robohnya reklame yang bisa menimbulkan korban jiwa. Pemasangan reklame yang tidak sesuai peraturan dan menggunakan material yang kurang layak seharusnya harus dihentikan karena hal tersebut sangat membahayakan. Pemerintah harus membuat peraturan menyangkut sanksi maupun prosedur terkait pemasangan reklame di area publik. Karena sering kali, kejadian reklame yang roboh akibat kondisi alam pihak pengembang maupun pemilik reklame tidak mendapat sanksi yang tegas. Untuk itu, guna menjamin keamanan bagi masyarakat serta pengguna jalan, lebih bijaksana jika membersihkan kawasan publik dari reklame yang kurang layak dan membahayakan.

Selanjutnya dari sisi Republika memberikan *treatment recommendation* ialah, menurut informasi TMC Polda Metro Jaya pada Sabtu malam, sebuah

balih roboh dan menimpa taksi di Jalan S Parman, Slipi, Jakarta Barat, tepatnya di depan RS Harapan Kita. Akibat dari kejadian tersebut lalu lintas di daerah tersebut tidak bisa dilintasi untuk beberapa saat. Kejadian robohnya reklame di kawasa DKI Jakarta menjadi hal yang umum dan sering terjadi, bahkan ada yang sampai memakan korban jiwa. Dalam pemberitaan tersebut Republika membahas mengenai reklame yang sering roboh dan membahayakan masyarakat. Untuk itu, pemerintah provinsi DKI Jakarta berencana untuk tidak lagi memebrikan ijin pemasangan reklame. Selain itu, pemprov juga ingin merapikan reklame-reklame yang sudah terpasang di seluruh DKI Jakarta untuk menciptakan kondisi yang aman bagi masyarakat. Reklame yang kurang layak serta melewati batas perijinan memang seharusnya mulai untuk di tumbangkan dan dihilangkan. Dengan pengurangan penggunaan reklame maka diharapkan menciptakan kondisi DKI Jakarta yang lebih rapi dan aman bagi masyakat serta pengguna jalan umum.

Tabel 3.4.9. Analisis *Treatment Recommendation* Pemberitaan 9

Media Massa	Treatment Recommendation
Tempo	Rizieq sendiri menyanggah memiliki masalah personal dengan Ahok. Rizieq datang bukan karena persoalan Ahok dan Habib Rizieq, antara Ahok dan FPI, Ahok dan GNPF-MUI. Tetapi karena ini persoalan pidana antara Ahok dan negara. Rizieq mengatakan siap datang sebagai saksi ahli, bahkan jika terdakwanya bukan Ahok
Republika	Rizieq menyatakan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan apa pun dengan terdakwa Ahok. Rizieq hanya tahu mengenai Ahok dari media, Rizieq mangaku datang bukan dikarenakan persoalan antara Ahok dan Habib Rizieq, antara Ahok dengan FPI maupun antara Ahok dengan GNPF-MUI

Pada analisis pemberitaan yang kesembilan, dari hasil diatas *treatment recommendation* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, menurut pengakuan Habib Rizieq Shihab kedatangan dirinya sebagai saksi ahli, merupakan permintaan dari penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri dan

dengan persetujuan MUI. Rizieq sendiri menyanggah memiliki masalah personal dengan Ahok. Rizieq datang bukan karena persoalan Ahok dan Habib Rizieq, antara Ahok dan FPI, Ahok dan GNPf-MUI. Tetapi karena ini persoalan pidana antara Ahok dan negara. Rizieq mengatakan siap datang sebagai saksi ahli, bahkan jika terdakwanya bukan Ahok. Dalam pemberitaan tersebut Tempo membahas mengenai sikap Rizieq yang tidak mau menyalami Ahok dan tim kuasa hukum, dianggap bahwa Rizieq mempunyai masalah pribadi dengan Ahok. Dan hal ini dianggap mempengaruhi keterangan Rizieq sebagai saksi ahli yang dihadirkan JPU. Tempo memberikan pemberitaan dari sudut pandang Ahok yang menilai Rizieq tidak netral serta memberikan porsi bagi pernyataan klarifikasi dari Rizieq atas tuduhan tersebut. Dengan itu Tempo mengangkat dua sisi yang berbeda dalam pemberitaan ini. Sebagaimana yang seharusnya, bahwa meskipun memiliki latar belakang tertentu seharusnya tidak mempengaruhi keterangan sebagai saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan. Saksi harus bersikap netral, dan memberikan keterangan sesuai dengan kapasitasnya.

Selanjutnya dari sisi Republika memberikan *treatment recommendation* ialah, menurut pengakuan Habib Rizieq Shihab tidak mengenal Ahok secara langsung, ia tidak mempunyai hubungan dengan Ahok dan tidak pernah bertemu. Rizieq menyatakan tidak mempunyai hubungan apa pun dengan terdakwa Ahok. Rizieq hanya tahu mengenai Ahok dari media, Rizieq mengaku datang bukan dikarenakan persoalan antara Ahok dan Habib Rizieq, antara Ahok dengan FPI maupun antara Ahok dengan GNPf-MUI. Rizieq hanya hadir untuk memberikan keterangan sebagai saksi ahli yang dihadirkan oleh JPU. Dalam pemberitaan tersebut Republika membahas mengenai Rizieq yang hadir dalam persidangan sebagai saksi ahli tanpa memiliki masalah pribadi dengan terdakwa Ahok. Rizieq dihadirkan sesuai kapasitasnya sebagai saksi ahli, dan memberikan keterangan yang menurutnya objektif sesuai dengan kapasitasnya tersebut. Karena sudah semestinya bahwa saksi yang dihadirkan dalam persidangan bersikap netral dan

memberikan keterangan se jelasnya, dan akhirnya majelis hakim yang mencerna dan menyimpan keterangan saksi.

Tabel 3.4.10. Analisis *Treatment Recommendation* Pemberitaan 10

Media Massa	Treatment Recommendation
Tempo	Jaksa penuntut umum tidak akan mendatangkan saksi lagi, sehingga majelis hakim mempersilakan tim kuasa hukum Ahok mendatangkan saksi meringankan di akhir persidangan
Republika	Majelis hakim mempersilahkan tim penasihat hukum menghadirkan para saksi pada pekan depan. Tim kuasa hukum dapat menghadirkan saksi atau saksi fakta yang meringankan, karena menghadirkan ahli tidaklah wajib

Pada analisis pemberitaan yang kesepuluh, dari hasil diatas *treatment recommendation* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, menurut Ketua Majelis Hakim, Dwiwarso Budi Setianto, jaksa penuntut umum tidak akan mendatangkan saksi lagi, sehingga majelis hakim mempersilakan tim kuasa hukum Ahok mendatangkan saksi meringankan di akhir persidangan. Setelah menghadirkan Rizieq dan Abdul, JPU merasa cukup, dan tidak akan menghadirkan saksi lagi, tidak menggunakan hak lagi. Dalam pemberitaan tersebut Tempo membahas mengenai tim kuasa hukum yang dipersilahkan untuk menghadirkan saksi yang meringankan pada persidangan selanjutnya. Hal ini dikarenakan JPU sudah merasa cukup dalam menghadirkan saksi, dan tidak akan menggunakan haknya kembali. Dalam persidangan juga terdapat sisi yang memberatkan serta meringankan bagi terdakwa. Untuk itu, setelah pihak yang memberatkan selesai menggunakan haknya, maka selanjutnya pihak yang meringankan akan menggunakan haknya guna meringankan dakwaan pada terdakwa. Kedua sisi ini menjadi hal yang harus ada dalam proses persidangan, terlepas mana sisi yang lebih baik maupaun yang lebih baik. Kedua sisi ini sewajarnya memberikan keterangan yang tetap netral meskipun ditujukan untuk memberatkan dan meringankan.

Selanjutnya dari sisi Republika memberikan *treatment recommendation* ialah, Majelis hakim mempersilahkan tim penasihat hukum menghadirkan para saksi pada pekan depan. Tim kuasa hukum dapat menghadirkan saksi atau saksi fakta yang meringankan, karena menghadirkan ahli tidaklah wajib. Salah satu anggota tim penasihat hukum terdakwa, Teguh Samudera mengungkapkan, mereka akan menghadirkan dua sampai tiga saksi yang meringankan baik itu dihadirkan dari Kepulauan Seribu maupun Jakarta. Dalam pemberitaan tersebut Republika membahas mengenai majelis hakim yang mempersilahkan tim kuasa hukum Ahok untuk menghadirkan saksi yang meringankan. Dan menanggapi hal tersebut, tim kuasa hukum Ahok akan menghadirkan 2-3 saksi yang meringankan Ahok pada persidangan selanjutnya. Saksi yang meringankan ini bisa merupakan saksi atau saksi fakta, karena saksi ahli yang meringankan akan dihadirkan di paling akhir, bahkan tidak wajib untuk dihadirkan oleh kuasa hukum.

Tabel 3.4.11. Analisis *Treatment Recommendation* Pemberitaan 11

Media Massa	Treatment Recommendation
Tempo	Peresmian makam Mbah Priok sebagai cagar budaya ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan Gubernur dari Ahok kepada Abdullah Sting Alaydrus. Habib Sting mewakili Habib Hasan mengucapkan terimakasih kepada Ahok. Habib Sting juga mendoakan Ahok agar terus menjadi Gubernur yang baik
Republika	Semoga kondisi masyarakat yang kondusif ini tidak diperkeruh. Sebab, Makam Mbah Priok merupakan cagar budaya. Tidak mengganggu industri, ekonomi, bahkan menjadi satu bentuk nyata di masyarakat majemuk bagaimana muslim tidak alergi dengan pancasila. Justru pancasila yang menghantar kita mengamalkan agama dengan baik

Pada analisis pemberitaan ini, dari hasil diatas *treatment recommendation* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, menurut salah satu keturunan Hasan bin Muhammad Al Hadad atau Mbah Priok, Abdullah Sting Alaydrus bahwa peresmian makam Mbah Priok sebagai cagar budaya ditandai dengan

penyerahan Surat Keputusan Gubernur dari Ahok kepada Abdullah Sting Alaydrus. Habib Sting mewakili Habib Hasan mengucapkan terimakasih kepada Ahok. Habib Sting juga mendoakan Ahok agar terus menjadi Gubernur yang baik. Acara peresmian tersebut ikut dihadiri ratusan jemaah yang juga tengah berziarah dan diakhiri dengan makan bersama. Dalam pemberitaan tersebut Tempo membahas mengenai Ahok yang mengesahkan makam Mbah Priok sebagai salah satu cagar budaya di Jakarta. Pengesahan makan Mbah Priok sebagai salah satu cagar budaya ini disambut baik oleh masyarakat sekitar, bahkan juga keturunan dari Mbah Priok. Diwakili melalui Habib Sting, atas pengesahan makam Mbah Priok menjadi cagar budaya, keluarga Mbah Priok sangat berterima kasih dan mendoakan Ahok. Warisan budaya yang telah dijaga kelestariannya secara turun temurun, memang seharusnya ditetapkan sebagai cagar budaya akar terjamin kelestariannya dan dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya.

Selanjutnya dari sisi Republika memberikan *treatment recomendation* ialah, menurut kakak angkat Ahok, Andi Analta Amir yang mendampingi Ahok dalam kunjungan ke makam Mbah Priok menuturkan agar kondisi masyarakat yang kondusif ini tidak diperkeruh. Sebab, Makam Mbah Priok merupakan cagar budaya. Tidak mengganggu industri, ekonomi, bahkan menjadi satu bentuk nyata di masyarakat majemuk bagaimana muslim tidak alergi dengan pancasila. Justru pancasila yang menghantar kita mengamalkan agama dengan baik. Dalam pemberitaan tersebut Republika membahas mengenai Ahok yang mengunjungi serta meninjau kawasan makam Mbah Priok didoakan oleh salah satu keturunan Mbah Priok, yaitu Habib Sting. Analta Amir yang mendampingi Ahok sebagai keluarganya mengatakan bahwa, Ahok didoakan secara umum saja. Mengenai bagaimana bersilaturahmi dengan orang yang sudah meninggal, yang berarti tidak memiliki unsur sirik. Sebagaimana yang diketahui dalam ajaran Islam, bersilaturahmi dengan orang yang sudah meninggal tetap diperbolehkan. Dengan syarat hal tersebut tidak dilakukan secara berlebihan dan untuk tujuan tertentu yang kurang baik.

Tabel 3.4.12. Analisis *Treatment Recommendation* Pemberitaan 12

Media Massa	Treatment Recommendation
Tempo	Sebelum meninggalkan hotel, Djarot memberikan pernyataan yang mengungkapkan kekecewaannya. Dengan melihat keadaan ini dinilai terdapat ketidakprofesionalan dari penyelenggara
Republika	Tim sukses belum berpikir akan melaporkan kejadian ini ke Bawaslu. Tim sukses lebih memikirkan orang yang diundang untuk datang selayaknya dihormati. Tidak baik jika yang mengundang tidak menghormati yang diundang

Pada analisis pemberitaan ini, dari hasil diatas *treatment recommendation* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, sebelum meninggalkan hotel, Djarot memberikan pernyataan yang mengungkapkan kekecewaannya. Dengan melihat keadaan ini dinilai terdapat ketidakprofesionalan dari penyelenggara. Menurut Djarot sikap dari penyelenggara yang tidak memberikan pemberitahuan serta alasan yang jelas terkait diundurnya acara yang digelar, menunjukan penyelenggara tidak memiliki itikad baik. Untuk itu Ahok-Djarot memilih meninggalkan acara tersebut, dan menyerahkannya kepada tim suksesnya. Dalam pemberitaan tersebut Tempo membahas mengenai penyebab pasangan calon nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat meninggalkan acara penetapan pasangan calon gubernur DKI yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Acara yang tidak sesuai jadwal pelaksanaan membuat Ahok merasa keberatan, karena di waktu yang sama juga mendapat undangan untuk menghadiri acara lainnya. Seharusnya sebuah acara yang sudah dijadwalkan dapat dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaannya. Namun jika terpaksa ditunda, maka lebih bijaksana untuk memberikan penjelasan yang jelas terkait alasan penundaan dan kapan penjadwalan baru untuk acara akan dilaksanakan. Jika yang terjadi tanpa keterangan dan keadaan yang jelas, maka akan membuat orang-orang yang terkait dengan acara merasa kebingungan dan akhirnya akan kecewa atas sikap penyelenggara yang kurang profesional.

Selanjutnya dari sisi Republika memberikan *treatment recommendation* ialah, menurut salah satu Tim sukses Ahok-Djarot, Fayakhun Andriadi menjelaskan bahwa tim sukses belum berpikir akan melaporkan kejadian ini ke Bawaslu. Tim sukses menekankan sebaiknya lebih memikirkan orang diundang untuk datang selayaknya dihormati. Tidak baik jika yang mengundang tidak menghormati yang diundang. Dalam pemberitaan ini Republika membahas mengenai alasan Ahok-Djarot meninggalkan acara pleno KPUD serta bagaimana tanggapan dari pihak Ahok. Ahok merasa keberatan karena acara yang dijadwalkan molor dan pihak penyelenggara tidak memberikan alasan yang jelas terkait jadwal acara. Untuk itu, pihak Ahok berharap agar pengundang juga menghormati tamu yang diundang. Karena dengan saling menghormati dan menghargai baik satu sama lain akan membuat keadaan yang lebih baik. Acara akan berjalan lancar dan sesuai dengan semestinya jika kudea belah pihak antara penyelenggara serta undangan mampu saling menghormati untuk berjalannya sebuah acara.

Tabel 3.4.13. Analisis *Treatment Recommendation* Pemberitaan 13

Media Massa	Treatment Recommendation
Tempo	Kuasa hukum disarankan menghadirkan saksi fakta lain, meskipun tidak masuk dalam pemberkasan. Saksi fakta Andi bisa digantikan oleh orang yang mengetahui atau memiliki latar belakang yang sama
Republika	Tidak dikabulkan sebagai saksi fakta karena kebiasaan di persidangan saja. Karena dalam KUHP saksi hanya dilarang bercakap-cakap dengan saksi lain

Pada analisis pemberitaan ini, dari hasil diatas *treatment recommendation* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, kuasa hukum disarankan oleh ketua majelis hakim, Dwiarso Budi Santiarto untuk menghadirkan saksi fakta lain, meskipun tidak masuk dalam pemberkasan. Saksi fakta Andi bisa digantikan oleh orang yang mengetahui atau memiliki latar belakang yang sama. Kuasa hukum diperbolehkan menghadirkan saksi fakta lain, yang memiliki

pengetahuan yang sama atau tidak jauh berbeda dengan Andi. Dalam pemberitaan tersebut Tempo membahas mengenai saksi fakta Andi Analta yang ditolak kesaksiannya karena pernah menghadiri persidangan Ahok sebelumnya. Untuk itu ketua majelis hakim, Dwiarso Budi Santiarto tidak mengabulkan Andi sebagai saksi dan menyarankan kuasa hukum untuk mencari saksi fakta lain yang meringankan untuk Ahok. Sesuai dengan peraturan dalam persidangan yang melarang antara saksi dengan saksi lainnya untuk berhubungan, karena dipertimbangkan akan mampu mempengaruhi keterangan yang diberikan oleh saksi dipersidangan. Oleh karena itu memang sebaiknya saksi tidak saling berhubungan, dan hanya akan menyampaikan keterangan sesuai dengan BAP yang telah diterima, bukan dari penjelasan saksi lainnya.

Selanjutnya dari sisi Republika memberikan *treatment recommendation* ialah, menurut kakak angkat Ahok, Andi Analta Amir tidak dikabulkan sebagai saksi fakta karena kebiasaan di persidangan saja. Karena dalam KUHP saksi hanya dilarang bercakap-cakap dengan saksi lain. Seperti yang diketahui sebelumnya Analta ditolak karena pernah datang ke persidangan sebelumnya. Menanggapi hal tersebut Andi menegaskan, ia tidak pernah berbincang dengan saksi lainnya. Dalam pemberitaan tersebut Republika membahas mengenai salah satu saksi fakta yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum, ditolak untuk memberikan kesaksiannya oleh majelis hakim. Alasan saksi fakta ini ditolak karena pernah menghadiri persidangan kasua dugaan penodaan agama sebelumnya. Namun, majelis hakim memberikan kesempatan bagi kuasa hukum untuk menghadirkan saksi lain yang akan menggantikannya, meskipun tidak tercatat dalam pemberkasan yang telah diberikan. Meskipun Andi mengaku tidak pernah berbincang dengan saksi lainnya, namun sudah menjadi kebiasaan dipersidangan bahwa pihak yang akan memberikan kesaksian dalam persidangan untuk tidak menghadiri persidangan saat saksi lainnya memberikan kesaksiannya. Hal ini untuk menghindari keterangan saksi yang bisa tertengaruh oleh keterangan saksi lainnya. Untuk itu demi berjalannya persidangan yang seadil-adilnya maka sudah

sewajarnya jika saksi memberikan kesaksian yang sesuai kapasitasnya dan tanpa dipengaruhi oleh pihak lain.

Tabel 3.4.14. Analisis *Treatment Recommendation* Pemberitaan 14

Media Massa	Treatment Recommendation
Tempo	Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot diundang oleh Megawati Soekarno Putri untuk turut hadir menyambut presiden Afrika Selatan Jacob Zuma yang datang bersama enam menterinya. Mereka menemui Mega sehari setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Indian Ocean Rim Association (KTT IORA)
Republika	Pembicaraan antara Megawati dengan Presiden Jacob Zuma, membicarakan soal kunjungan balasan dari kunjungan Presiden Megawati. Selain itu, juga membicarakan soal kerja sama antara kedua partai politik yakni PDI Perjuangan serta partainya Jacob Zuma

Pada analisis pemberitaan ini, dari hasil diatas *treatment recommendation* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, menurut Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto bahwa Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot diundang oleh Megawati Soekarno Putri untuk turut hadir menyambut presiden Afrika Selatan Jacob Zuma yang datang bersama enam menterinya. Mereka menemui Mega sehari setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Indian Ocean Rim Association (KTT IORA). Megawati menyambut Zuma dengan setelan biru bermotif lengkap dengan selendang berwarna emas yang melingkari tubuhnya. Sedangkan Ahok dan Djarot pun kompak memakai batik kuning. Dalam pemberitaan tersebut Tempo membahas mengenai Ahok dan Djarot yang turut serta dalam menyambut Presiden Afrika Selatan, Jacob Zuma yang mengunjungi Megawati Soekarnoputri di kediamannya, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Ahok-Djarot hadir untuk menyambut Zuma karena diundang oleh Megawati untuk ikut serta dalam penyambutan tersebut. Kunjungan tersebut diungkapkan sebagai kunjungan untuk kunjungan bersilaturahmi antara presiden

Afrika Selatan dengan Megawati, bukanlah kunjungan terkait politik kenegaraan.

Selanjutnya dari sisi Republika memberikan *treatment recommendation* ialah, pembicaraan antara Megawati dengan Presiden Jacob Zuma, membicarakan soal kunjungan balasan dari kunjungan Presiden Megawati. Selain itu, juga membicarakan soal kerja sama antara kedua partai politik yakni PDI Perjuangan serta partainya Jacob Zuma. Dalam pemberitaan tersebut Republika membahas mengenai Megawati Soekarnoputri yang mendapat kunjungan dari Presiden Afrika Selatan, Jacob Zuma. Kunjungan tersebut dilakkan sehari setelah Zuma menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Indian Ocean Rim Association (KTT IORA) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta. Kunjungan Presiden Afrika Selatan bukanlah sebuah kunjungan yang membahas hal-hal kenegaraan, melainkan hal pada level yang lain.

Tabel 3.4.15. Analisis *Treatment Recommendation* Pemberitaan 15

Media Massa	Treatment Recommendation
Tempo	Majelis hakim akhirnya menerima Edward untuk tetap bisa memberikan pandangannya. Keputusan tersebut diambil karena pada persidangan sebelumnya JPU menegaskan tidak ada tambahan saksi yang akan dihadirkan di persidangan. Apapun keterangan ahli, akan dipertimbangkan oleh majelis hakim
Republika	Keragu-raguan dari saksi Edward ialah, di satu sisi mengatakan belum ada unsur niat pelaku untuk melakukan tindakan penodaan agama. Tapi ketika dikonfirmasi dalam BAP, apabila diperlihatkan dalam video-video lainnya, maka unsur niat itu sudah terpenuhi

Pada analisis pemberitaan ini, dari hasil diatas *treatment recommendation* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, menurut Ketua Majelis Hakim, Dwiwarso Budi Santiarso permintaan dari JPU tidak bisa dikabulkan. Oleh karena itu majelis hakim akhirnya menerima Edward untuk tetap bisa memberikan pandangannya. Keputusan tersebut diambil karena pada persidangan

sebelumnya JPU menegaskan tidak ada tambahan saksi yang akan dihadirkan di persidangan. Apapun keterangan ahli, akan dipertimbangkan oleh majelis hakim, baik itu yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam pemberitaan tersebut Tempo membahas mengenai majelis hakim yang tetap menerima Edward sebagai saksi ahli hukum pidana yang meringankan terdakwa Ahok. Majelis hakim yang dipimpin Dwiwarso tidak setuju dengan tuntutan dari JPU yang menyatakan bahwa saksi ahli yang hendak dihadirkan JPU, secara tidak langsung telah berhubungan dengan kuasa hukum terdakwa dan tidak etis untuk dihadirkan oleh kuasa hukum. Untuk itu Edward tetap diperbolehkan memberikan kesaksian yang akan meringankan terdakwa, sesuai dengan kapasitasnya dalam persidangan kasus dugaan penistaan agama, dengan terdakwa Ahok. Majelis hakim menyatakan akan mempertimbangkan semua keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi di dalam persidangan.

Selanjutnya dari sisi Republika memberikan *treatment recommendation* ialah, menurut Koordinator Tim Persidangan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), Nasrulloh Nasution keragu-raguan dari saksi Edward ialah, di satu sisi mengatakan belum ada unsur niat pelaku untuk melakukan tindakan penodaan agama. Tapi ketika dikonfirmasi dalam BAP, apabila diperlihatkan dalam video-video lainnya, maka unsur niat itu sudah terpenuhi. Dalam pemberitaan tersebut Republika membahas mengenai alasan yang menyebabkan saksi ahli Edward tidak dihadirkan oleh JPU di dalam persidangan kasus dugaan penodaan agama. Sikap dari ahli yang menjelaskan tindakan Ahok dengan keragu-raguan menjadi pertimbangan utama dalam tidak dipanggilnya Edward dalam persidangan. Karena keragu-raguan tersebut, menurut Nasrulloh, menjadi ketidakjelasan sehingga membuat JPU tidak perlu menanyakan lebih lanjut kepada ahli. Namun, sangat disayangkan saksi ahli Edward justru dihadirkan oleh tim kuasa hukum di persidangan dengan terdakwa Ahok tersebut.

Tabel 3.4.16. Analisis *Treatment Recommendation* Pemberitaan 16

Media Massa	Treatment Recommendation
Tempo	Intinya Ahok sudah berada ada dalam koridor yang mengutamakan keadilan bagi masyarakat. Namun, kadang-kadang dipelintir dan diciptakan persepsi di publik bahwa seakan-akan Ahok tidak memiliki perhatian pada masyarakat miskin, hanya membangun yang ditujukan bagi elite dan pengembang tertentu. Menurut Yudhi, pemikiran Ck Nur sedikit-banyaknya sudah ada pada diri Ahok
Republika	Indonesia negara bangsa yang melayani dan memberikan perlindungan pada seluruh warganya tanpa diskriminatif, tanpa pilih kasih dan sebagainya. Ide tersebut yang disimbolkan didalam buku yang marangkum pemikiran Cak Nur tersebut, dan disimboliskan diserahkan kepada Ahok, agar mampu menjadi Gubernur yang mengutamakan keadilan masyarakat jika terpilih kembali

Pada analisis pemberitaan ini, dari hasil diatas *treatment recommendation* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, menurut pengamat politik Yudhi Latif yang juga sahabat Nurcholis secara garis besar intinya Ahok sudah berada ada dalam koridor yang mengutamakan keadilan bagi masyarakat. Namun, kadang-kadang dipelintir dan diciptakan persepsi di publik bahwa seakan-akan Ahok tidak memiliki perhatian pada masyarakat miskin, hanya membangun yang ditujukan bagi elite dan pengembang tertentu. Menurut Yudhi, pemikiran Ck Nur sedikit-banyaknya sudah ada pada diri Ahok. Dalam pemberitaan tersebut Tempo membahas mengenai pemikiran-pemikiran yang diperjuangkan oleh Cak Nur sudah tergambar dan dimiliki oleh Ahok dalam menjalankan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Untuk tujuan yang baik maka nilai-nilai yang selama ini diperjuangkan oleh Cak Nur, sebaiknya untuk terus dijalankan oleh Ahok jika nanti terpilih menjadi gubernur. Karena masyarakat yang menjadi tujuan dari dipilihnya gubernur yang seharusnya melayani dan bekerja untuk kesejahteraan masyarakat. Maka sudah seharusnya bahwa gubernur akan mengemban keadilan bagi seluruh masyarakat, tanpa diskriminatif, pilih kasih dan sebagainya.

Gubernur dipilih oleh dan untuk masyarakat, maka masyarakat lah yang menjadi tujuan dari kinerja gubernur.

Selanjutnya dari sisi Republika memberikan *treatment recomendation* ialah, menurut Budhy yang merupakan penulis Ensiklopedia Nurcholish Madjid, Indonesia merupakan negara bangsa yang melayani dan memberikan perlindungan pada seluruh warganya tanpa diskriminatif, tanpa pilih kasih dan sebagainya. Ide tersebut yang disimbolkan didalam buku yang marangkum pemikiran Cak Nur tersebut, dan disimboliskan diserahkan kepada Ahok, agar mampu menjadi Gubernur yang mengutamakan keadilan masyarakat jika terpilih kembali. Dalam pemberitaan tersebut Republika membahas mengenai keluarga Cak Nur yang menitipkan perjuangan-perjuangan Cak Nur kepada Ahok jika nanti terpilih kembali menjadi gubernur. Keluarga Cak Nur menitipkan perjuangan Cak Nur melalui pemberian buku-buku yang berisi pemikiran-pemikiran Cak Nur kepada Ahok. Seara simbolis dengan memberikan buku tersebut juga menitipkan pemikiran Nurcholis Madjid kepada Ahok agar bisa mejadi gubernur yang mengutamakan keadilan bagi masyarakat jika nantinya terpilih kembali.

Tabel 3.4.17. Analisis *Treatment Recomendation* Pemberitaan 17

Media Massa	Treatment Recomendation
Tempo	Anies Baswedan lebih memilih masyarakat untuk menilai kerjasama angkutan umum tersebut dengan program Ok Otrip yang Anies rancang bersama timnya. Namun, Anies mengaku bersyukur ide tersebut diadopsi, dijalankan dan dianggap sebagai pengakuan kebaikan sebuah gagasan
Republika	Anies Baswedan menjanjikan sistem transportasi publik dilakukan secara terintegrasi. Bukan hanya Transjakarta yang saat ini terintegrasi, tetapi juga angkutan ke kampung-kampung, yang baik trayek dan sistem pembayaran juga ikut terintegrasi

Pada analisis pemberitaan ini, dari hasil diatas *treatment recomendation* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, menurut Anies Baswedan lebih memilih masyarakat untuk menilai kerjasama angkutan umum tersebut dengan

program Ok Otrip yang Anies rancang bersama timnya. Namun, Anies mengaku bersyukur ide tersebut diadopsi, dijalankan dan dianggap sebagai pengakuan kebaikan sebuah gagasan. Dalam pemberitaan tersebut Tempo memberitakan mengenai tanggapan Ahok terhadap pernyataan Anies yang menilai bahwa program Ok Otrip yang dirancang oleh Anies telah ditiru oleh Ahok. Ahok sendiri menanggapi hal tersebut dengan menyatakan bahwa, integrasi Transjakarta dengan angkutan umum KWK sudah diatur dalam undang-undang lalu lintas. Selain itu, Ahok juga menjelaskan aturan terkait integrasi sendiri keluar jauh hari sebelum pilkada DKI 2017. Dengan kata lain, bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sama sekali tidak meniru program Ok Otrip yang dirancang oleh Anies. Melainkan Anies hanya menyatakan program-program yang sudah ada dan dijalankan oleh Pemprov.

Selanjutnya dari sisi Republika memberikan *treatment recommendation* ialah, Anies Baswedan menjanjikan sistem transportasi publik dilakukan secara terintegrasi. Bukan hanya Transjakarta yang saat ini terintegrasi, tetapi juga angkutan ke kampung-kampung, yang baik trayek dan sistem pembayaran juga ikut terintegrasi. Dalam pemberitaan tersebut Republika membahas mengenai Anies yang menjelaskan program-program yang dirancangnya yang disebut dicontek oleh Ahok. Menurut Anies pelaksanaan ide yang dirancang bersama timnya saat ini secara tak langsung merupakan wujud pengakuan ide tersebut bagus, terlepas dari diakui atau tidak. Karena pelaksanaan program tersebut sangat penting, dikarenakan jalur transportasi publik yang terintegrasi dan memadai sangat penting untuk mengurangi kemacetan Jakarta. Dengan tersedianya angkutan umum yang terintegrasi dengan baik, maka akan sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas kesehariannya dengan menggunakan angkutan umum. Dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, secara tidak langsung akan membuat masyarakat lebih sejahtera dan merasa percaya terhadap pemerintah.

Tabel 3.4.18. Analisis *Treatment Recommendation* Pemberitaan 18

Media Massa	Treatment Recommendation
Tempo	Polisi akan mendalami alasan wanita tersebut membawa sangkur ke ruang sidang. Meskipun wanita tersebut menyatakan bahwa hal tersebut hanya kebiasaannya saja membawa sangkur, tetapi polisi masih melakukan pendalaman
Republika	Motif wanita tersebut membawa sangkur saat ini masih dalam pemeriksaan polisi. Dengan pengakuan dari wanita tersebut, yang mengungkapkan bahwa dia membawa sangkur di dalam tas merupakan kebiasaan belaka, namun polisi masih lakukan pendalaman atas kasus tersebut

Pada analisis pemberitaan ini, dari hasil diatas *treatment recommendation* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, menurut Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan Ajun Komisaris Besar, Dony Alexander pihak kepolisian akan mendalami alasan wanita tersebut membawa sangkur ke ruang sidang. Meskipun wanita tersebut menyatakan bahwa hal tersebut hanya kebiasaannya saja membawa sangkur, tetapi polisi tetap akan melakukan pendalaman. Dalam pemberitaan tersebut Tempo membahas mengenai kepolisian yang mengamankan wanita yang membawa senjata tajam saat akan mengikuti persidangan lanjutan kasus dugaan panistaan agama dengan terdakwa Ahok. Untuk mencegah adanya hal yang tidak diinginkan, pengamanan di area Auditorium Kementerian Pertanian dilakukan dengan ketat setiap sidang akan digelar. Bahkan di setiap pintu dipasang alat pendeteksi logam. Polisi juga selalu memeriksa isi tas yang dibawa setiap pengunjung dan mengecek seluruh tubuh, dari kepala sampai kaki. Hal ini dilakukan sebagai upaya antisipasi dari kejaidan-kejaidan yang tidak diinginkan yang dinilai dapat mengganggu jalannya persidangan.

Selanjutnya dari sisi Republika memberikan *treatment recommendation* ialah, menurut Kabag Ops Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Dony Alexander di Gedung Auditorium Kementan, bahwa motif wanita tersebut membawa

sangkur saat ini masih dalam pemeriksaan polisi. Dengan pengakuan dari wanita tersebut, yang mengungkapkan bahwa dia membawa sangkur di dalam tas merupakan kebiasaan belaka, namun polisi masih lakukan pendalaman atas kasus tersebut. Dalam pemberitaan tersebut Republika membahas mengenai pihak kepolisian yang mengamankan dan mendalami motif dari wanita yang membawa senjata tajam jenis sangkur dalam persidangan kasus dugaan penodaan. Wanita yang mengenakan atribut relawan Ahok tersebut, dari informasi awal memang merupakan relawan Ahok, tetapi setelah ditelusuri, niatnya yang bersangkutan ingin masuk jadi relawan Ahok. Dan masih menggunakan atribut relawan Ahok saat diamankan oleh pihak kepolisian. Untuk memaksimalkan proses berjalannya persidangan kasus dugaan penodaan agama, pihak kepolisian melakukan pengamanan yang cukup ketat untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat mengganggu berjalannya persidangan, termasuk pemeriksaan terhadap pengunjung yang akan mengikuti persidangan.

Tabel 3.4.19. Analisis *Treatment Recommendation* Pemberitaan 19

Media Massa	Treatment Recommendation
Tempo	Isi dari pidato yang disampaikan Ahok merupakan kata-kata yang terlintas di pikiran. Majelis hakim pun diminta memperhatikan cara bicara Ahok saat berpidato yang tidak pernah terputus-putus
Republika	Dalam berpidato Ahok terbiasa berbicara apa yang terlintas di benak. Tidak ada berpikir jeda dalam pidato yang disampaikan Ahok. Lebih lanjut dalam event apa saja, Ahok menilai langsung bisa berpidato

Pada analisis pemberitaan ini, dari hasil diatas *treatment recommendation* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, menurut Basuki Tjahaja Purnama isi dari pidato yang disampaikan olehnya merupakan kata-kata yang terlintas di pikiran. Majelis hakim pun diminta memperhatikan cara bicara Ahok saat berpidato yang tidak pernah terputus-putus. Ahok mengaku tidak pernah berpidato memakai jeda berpikir lama, karena yang di pikiran Ahok itulah hal yang disampaikan untuk berpidato. Dalam pemberitaan tersebut Tempo

membahas mengenai alasan yang menyebabkan Ahok bersasumsi bahwa dikarenakan surat Al-maidah yang menyebabkan ibu-ibu kurang antusias terhadap program yang akan dijelankannya. Ahok mengasumsikan alasan dari dari ibu-ibu ini berdasarkan dari pengalamannya ketika dirinya mencalonkan di Bangka Belitung yang lalu. Namun hal tersebut dianggap salah oleh majelis hakim, karena seharusnya Ahok lebih baik menanyakan dahulu alasan dari ibu-ibu yang tidak antusias. Bukan membuat asumsi yang bisa saja salah dan tanpa memiliki dasar yang kuat.

Selanjutnya dari sisi Republika memberikan *treatment recomendation* ialah, menurut Ahok dalam berpidato dirinya terbiasa berbicara apa yang terlintas di benak. Tidak ada berpikir jeda dalam pidato yang disampaikan Ahok. Lebih lanjut dalam event apa saja, Ahok menilai langsung bisa berpidato. Dalam pemberitaan tersebut Republika membahas mengenai alasan dari Ahok membahas mengenai surat Al-maidah dalam pidato yang dilakukan di Kepulauan Seribu. Kebiasaan berpidato tanpa melakukan jeda waktu yang lama untuk melanjutkan materinya dalam berpidato, Ahok terbiasa mengatakan materi yang terlintas dalam berpidato. Kebiasaan tersebut bagus untuk dilakukan karena mampu membuat yakin dan tidak terlihat berpikir lama dalam mencari materi pidato. Namun hal tersebut juga bisa menjadi hal yang buruk, jika tidak terlalu memahami secara luas bisa saja menyebabkan kesalahpahaman yang terjadi dari materi yang dikatakan.

Tabel 3.4.20. Analisis *Treatment Recomendation* Pemberitaan 20

Media Massa	Treatment Recomendation
Tempo	Ayah Ahok mengajarkan anak-anaknya bahwa orang satu bangsa dan satu Tanah Air itu bersaudara. Tidak pernah diajarkan untuk membeda-bedakan dengan lainnya
Republika	Sisa waktu sampai hari pencoblosan sangatlah pendek. Jadi menurut Ahok, bila Tuhan tidak mengijinkan dirinya kembali menjadi Gubernur, setidaknya dia tetap memiliki waktu sampai Oktober 2017 untuk membenahi Jakarta

Pada analisis pemberitaan ini, dari hasil diatas *treatment recommendation* pemberitaan tersebut menurut Tempo adalah, menurut Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bahwa ayahnya mengajarkan anak-anaknya bahwa orang satu bangsa dan satu Tanah Air itu bersaudara. Tidak pernah diajarkan untuk membedakan dengan lainnya. Dalam pemberitaan tersebut Tempo membahas mengenai Ahok yang teringat akan pesan dari ayahnya ketika pulang ke kampung halamannya di Bangka Belitung dan berziarah ke makam ayahnya. Pesan yang terus dipegang dan diperjuangan oleh Ahok agar tidak lupa diri ketika sudah memegang jabatan yang tinggi. Pesan yang membuanta yakin kalau saat Ahok menjadi pejabat, mampu lawan mereka pejabat yang korup.

Selanjutnya dari sisi Republika memberikan *treatment recommendation* ialah, dengan melihat sisa waktu sampai hari pencoblosan sangatlah pendek. Jadi menurut Ahok, bila Tuhan tidak mengijinkan dirinya kembali menjadi Gubernur, setidaknya dia tetap memiliki waktu sampai Oktober 2017 untuk membenahi Jakarta. Dalam pemberitaan tersebut Republika membahas mengenai Ahok yang pulang ke kampung halamannya untuk berziarah ke makam ayahnya menjelang Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Ahok menilai jika dirinya tidak terpilih kembali, maka dia masih menjadi Gubernur sampai Oktober. Dalam waktu yang cukup singkat tersebut Ahok mengaku akan berusaha semaksimal mungkin membereskan program kesehatan yang penting bagi masyarakat. Program-program yang mengacu untuk kesejahteraan masyarakat ini, akan lebih baik jika mampu terealisasikan dengan lebih cepat.